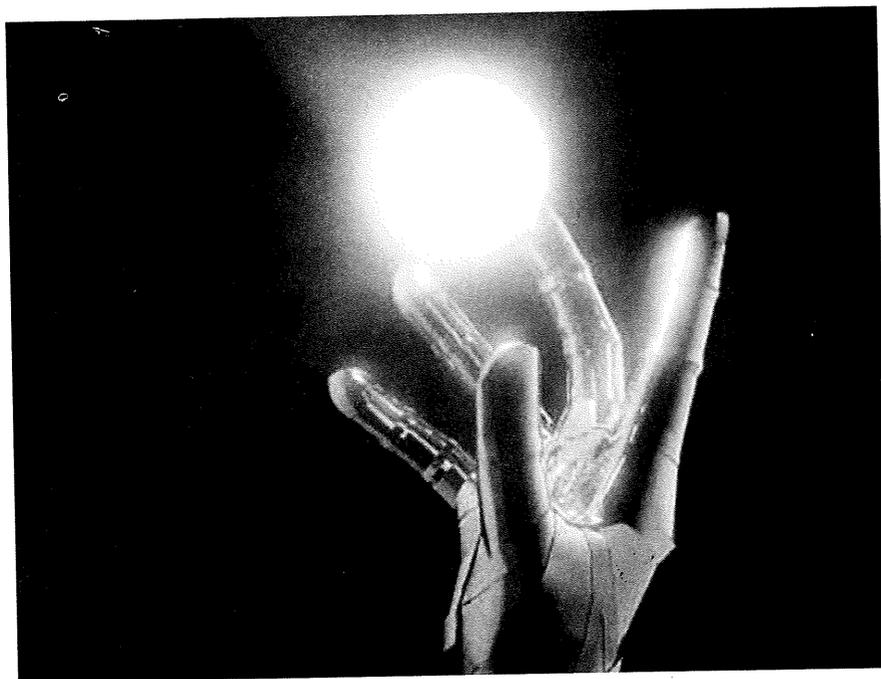


POSO *pasca* KONFLIK

KELEMBAGAAN DAN PEMULIHAN EKONOMI



Editor Savitri Dyah Lidya Ariesusanty Akmadi Abbas



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna
Subang - 2005

© 2005 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna (B2P TTG), Subang
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

KATALOG DALAM TERBITAN

Poso Pasca Konflik : Kelembagaan dan Pemulihan Ekonomi - Subang. B2P
TTG LIPI, 2005.

VIII + 88 hlm.; 14.8 X 21 cm.

1. Kelembagaan. 2. Ketahanan pangan. 3. Pemberdayaan masyarakat.
4. Trauma pasca konflik. I. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

ISBN : 979 - 3673-31-1

Diterbitkan oleh:



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna
Subang - 2005

KATA PENGANTAR

Konflik Poso, hingga kini belum tertuntaskan, hal ini membuat kondisi Poso tidak menentu. Kondisi yang membuat warga Poso ragu dalam melangkah untuk menata kembali kehidupannya yang telah hancur akibat konflik yang masih saja menyisakan permasalahan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi hingga kini bahkan memperkuat keraguan masyarakat termasuk juga orang-orang yang ingin berkunjung ke Poso. Dengan kondisi seperti ini tentunya akan sangat berpengaruh pada roda ekonomi daerah, yang juga berdampak pada ekonomi masyarakatnya. Mencermati hal tersebut maka upaya khusus perlu dilakukan secara hati-hati dan bersungguh-sungguh untuk membantu Pemerintah Daerah serta masyarakat Poso dalam upaya pemulihan kondisi sosial ekonominya. Penanganan yang terintegrasi diperlukan karena permasalahannya yang kompleks tidak dapat dipandang hanya dari satu sisi permasalahan saja.

Trauma yang dialami masyarakat Poso harus segera ditangani secara profesional untuk membangun rasa aman dan percaya diri. Dengan tumbuhnya rasa aman, maka perlahan-lahan trauma yang dialami dapat tersisihkan. Meskipun ini semua tidak mudah dan memerlukan waktu yang cukup lama, tetapi harus segera dilakukan agar tidak menjadi berlarut-larut sehingga kelak lebih sulit lagi menanganinya. Berbagai dukungan diperlukan untuk mencapai kondisi yang diinginkan, yaitu aman dan damai. Dukungan kelembagaan dan kebijakan serta partisipasi serta tingkat toleransi masyarakat dituntut untuk mencapai kedamaian, kerukunan dan persatuan. Pertemuan yang diselenggarakan untuk mengupas permasalahan dan pilihan pemecahannya agar dapat diimplementasikan di wilayah Poso pada pasca konflik ini, merupakan salah satu bentuk kontribusi dan partisipasi dunia ilmu pengetahuan dan penelitian untuk turut memberikan bantuan kepada pemerintah daerah dalam upayanya memulihkan kondisi sosial ekonomi Poso.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat menjadi sumbangan yang berarti bagi penyelesaian masalah di wilayah Poso khususnya, juga wilayah lain umumnya yang memiliki permasalahan yang sama.

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME atas terbitnya buku ini. Terima kasih kami ucapkan pada para peneliti yang telah memberikan kontribusinya dalam penerbitan buku ini. Serta terima kasih kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan yang mendukung terbitnya buku ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Akhir kata semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Subang, 3 Juni 2005

Penyunting

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

*Savitri Dyah W.I.K.R. &
Akmadi Abbas*

PENDAHULUAN 1

Pemberdayaan Masyarakat 1

Dinamika Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat 4

Kelembagaan, Ketahanan Pangan dan
Pemberdayaan Masyarakat 7

Budiawati S. Iskandar

**KELEMBAGAAN: PEMULIH SOSIAL
EKONOMI PASCA KONFLIK SOSIAL** 11

Pranata Sosial Ekonomi 12

Kajian Pranata Sosial 16

Kesimpulan 19

Zulrizka Iskandar

**MASYARAKAT POSO PASCA KONFLIK:
HARAPAN DAN TANTANGAN** 21

Poso Pasca Konflik 21

Kondisi Psikologis Masyarakat Poso Pasca
Konflik 22

Pemulihan Kondisi Poso: Suatu Harapan dan
Tantangan 27

Peluang Pemulihan Poso 30

Syahyuti

PERAN DAN BENTUK KELEMBAGAAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT POSO PASCA KONFLIK	33
Kondisi Ketahanan Pangan di Indonesia	34
Masyarakat Poso dan Ketahanan Pangan	35
"Food Security" dan "Social Security"	36
Apa yang Dibutuhkan: Apakah "Kelembagaan", "Social Network", ataukah "Social Capital"?	41
Langkah-Langkah Menyusun Sebuah Kelembagaan Ketahanan Pangan di Poso Pasca Konflik	44
Karakter Khas Kelembagaan Ketahanan Pangan	47
Kesimpulan	50

Savitri Dyah W.I.K.R.

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN POSO PASCA KONFLIK	51
Sekilas Kabupaten Poso	53
Kecamatan Poso Kota	56
Kecamatan Poso Pesisir	57
Peningkatan Keterampilan Masyarakat	59
Pengembangan Usaha	61
Kendala dan Pemecahannya	63
Kesimpulan	65

	Catatan: Beberapa Peristiwa Sosial-Politik pada Bulan Juli – September 2004 di Poso	67
<i>Savitri Dyah W.I.K.R & Lidya Ariesusanty</i>	PENUTUP	71
	DAFTAR PUSTAKA	77
	TENTANG PENULIS	85

PENDAHULUAN

Savitri Dyah W.I.K.R. & Akmadi Abbas

Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan merupakan usaha untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi ke arah yang lebih baik. Atau merupakan upaya introduksi perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Pada dasarnya perubahan (sosial, budaya, dan ekonomi) merupakan bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, merupakan dinamika masyarakat dan menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan itu sendiri. Dapat dikatakan pembangunan adalah *perubahan kualitatif dan kuantitatif yang beragam dan mungkin tidak dapat diukur dengan segera* (Haque et al 1977: 15).

Pembangunan berimplikasi pada tiga hal yakni (Christenson, Robinson & Jerry ed. 1989): *perbaikan, pertumbuhan dan perubahan*. Pembangunan dalam arti pertumbuhan memusatkan perhatian pada kesejahteraan secara ekonomis termasuk transformasi struktur-struktur untuk melancarkan kemajuan teknologi dan perbaikan produksi serta distribusi barang dan jasa. Dalam arti perubahan, pembangunan menyangkut perspektif yang lebih luas, yaitu *perubahan sosial*. Menurut Fendley (Christenson, Robinson & Jerry ed. 1989) perubahan sosial adalah *transformasi masyarakat dan negara, sehingga harus dilihat sebagai perubahan yang direncanakan atau diarahkan*.

Idealnya, pembangunan di suatu wilayah haruslah mendorong perkembangan wilayah tersebut dengan optimasi sumberdaya alam dan manusia, serta potensi sosial-budaya, dan menciptakan wilayah atau masyarakat mandiri mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian prinsip pembangunan adalah

membantu masyarakat dalam memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, masyarakat tidak hanya sebagai obyek melainkan sebagai subyek pembangunan (Christenson, Robinson & Jerry ed. 1989: 3). Dari konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa *pemberdayaan masyarakat* merupakan inti dari kegiatan pembangunan atau dengan kata lain:

Pembangunan atau pengembangan masyarakat merupakan suatu proses pendidikan di masyarakat, guna meningkatkan kemampuan mereka dalam mengenali permasalahan dan kebutuhan diri, sehingga mampu menolong diri sendiri. Pengembangan dalam hal ini memberikan atau memperluas pilihan, dan intervensi teknologi (tepat guna) sebagai pemicu perkembangan (Carolina, Abbas, Dyah & Brojonegoro 1995).

Sementara itu pengembangan masyarakat sering dipandang hanya sebagai suatu program kegiatan. Sehingga dalam pelaksanaan, perencanaan dilakukan dengan mengacu pada teori-teori yang berkecenderungan di negara-negara maju yang belum tentu sesuai dengan Indonesia (wilayah yang menjadi sasaran pembangunan). Pengalaman Indonesia selama era orde baru menjadi cermin dari permasalahan pembangunan akibat persepsi yang kurang sesuai mengenai pembangunan.

Harus diingat bahwa sasaran kegiatan pembangunan adalah masyarakat, dengan tujuan memberdayakan masyarakat agar mampu menolong diri sendiri. Oleh karena itu pelibatan masyarakat sebanyak-banyaknya dalam kegiatan pembangunan sangat prinsip. Tetapi dalam pelaksanaannya, seringkali mengalami kendala, terutama karena besarnya populasi sementara program-program pembangunan yang umumnya dalam bentuk paket kurang memadai untuk dapat mencakup seluruh anggota masyarakat. Disamping dana yang dibutuhkan akan sangat besar. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi yang sesuai dan sekaligus dapat menjangkau seluruh sasaran pembangunan, kelompok dalam hal ini

merupakan alternatif yang sesuai. Menurut Jedlicka (1977) pelaksanaan suatu program atau kegiatan akan lebih efektif dan efisien bila diintroduksi melalui kelompok daripada individu. Kelompok dapat berfungsi sebagai agen peubah, serta memiliki kemampuan untuk mengadaptasi perubahan yang terus menerus dalam proses pembangunan. Kelompok bukan hanya merupakan sekumpulan orang, melainkan didalamnya terdapat interaksi, tujuan, serta nilai-nilai yang mengatur kelompok tersebut (Lenski & Lenski 1987). Kompetisi yang merupakan peluang konflik, selalu timbul didalam kelompok, tetapi juga hubungan yang terjalin dan nilai yang sama juga menjadi pemersatu kelompok.

Secara tradisional di dalam suatu masyarakat terdapat kelompok-kelompok sosial dengan fungsi dan peran tertentu. Biasanya kelompok yang ada didasarkan pada ikatan budaya dan ikatan sosial serta berfungsi sebagai pemersatu masyarakat sekaligus sebagai upaya mempertahankan keberadaan kelompok masyarakat tersebut. Karenanya kelompok dapat juga merupakan identitas anggota kelompok yang bersangkutan, dan meskipun bersifat informal memiliki pengaruh yang kuat terhadap anggota atau komunitasnya (Lenski & Lenski 1987).

Dalam implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok sebagai strategi, identifikasi kelompok lokal sangat penting agar implementasi kegiatan lebih efektif. Introduksi kegiatan melalui kelompok lebih efektif dibanding kepada individu ataupun komunitas secara keseluruhan. Bila hanya pada individu, akan membutuhkan waktu lama untuk persebarannya atau bahkan hanya akan menguntungkan perseorangan. Sedangkan pada komunitas memerlukan tenaga yang amat banyak, karena jumlah anggota komunitas yang banyak. Oleh karena itu kelompok lebih efektif, karena mewakili berbagai anggota masyarakat dan kepentingan. Sehingga persebaran kegiatan akan lebih merata dengan waktu yang relatif lebih singkat. Selain itu melalui kelompok, pengawasan atau monitoring perkembangan suatu kegiatan akan lebih mudah dibandingkan pada individu atau komunitas.

Dalam pelaksanaannya pembentukan kelompok tidak harus mulai dari awal, tetapi dapat memanfaatkan kelompok yang ada (pranata tradisional), atau lebih diarahkan pada pendaya-gunaan kelompok yang ada. Dapat juga dilakukan dengan memadukan kelompok baru dan kelompok tradisional. Yang perlu diperhatikan dalam strategi ini dan sangat penting dalam kegiatan secara keseluruhan adalah seleksi kelompok. Ketepatan dalam seleksi kelompok akan sangat membantu dalam kelancaran kegiatan pembangunan dan terjadinya alih teknologi.

Bila dipandang secara umum, maka permasalahan pembangunan di Indonesia adalah pertumbuhan yang tidak merata antar daerah. Selain kondisi geografis yang berbeda di tiap daerah, juga karena keaneka ragaman sosial-budaya masyarakat menghadapkan pembangunan pada tingkat kesulitan yang tinggi pada pelaksanaannya. Sistem sentralisasi yang dianut pada era orde baru, yang telah menyama-ratakan pola dan permasalahan pembangunan, mendorong pada disparitas pembangunan. Dengan otonomi daerah, diharapkan dapat mengurangi disparitas pembangunan. Tetapi pada kenyataannya tidaklah semudah itu. Berbagai faktor seperti rendahnya aksesibilitas, informasi, dan fasilitas pembangunan di beberapa daerah menjadi kendala. Demikian pula yang terjadi di wilayah Poso, yang makin dipersulit dengan adanya konflik antar kelompok masyarakat yang terjadi beberapa tahun yang lalu, yang berakibat pada rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Dinamika Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan yang merupakan upaya memberdayakan masyarakat sebagai sasaran pembangunan tidak terlepas dari unsur dinamika sosial/masyarakat, karena masyarakat tidaklah statis. Dinamika sosial dapat menjadi faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam proses pembangunan. Karena dalam dinamika sosial terdapat aspek konflik. Dinamika sosial menggambarkan masyarakat sebagai

kompleks relasi sosial, tidak pernah statis, selalu dalam perubahan yang terus menerus, tetapi dalam derajat yang berbeda (Gittler 1952: 241).

Bagi Indonesia keaneka-ragaman budaya dan geografi wilayah, merupakan kendala nyata dalam pembangunan. Pembangunan dengan satu pola membawa dampak pada kesenjangan antar daerah. Berbagai pendekatan dan strategi pembangunan telah dikembangkan, tetapi belum dapat mengatasi semua permasalahan yang ada. Hambatan dalam proses pembangunan masih saja terjadi, meskipun beberapa kegiatan pembangunan menerapkan pendekatan yang memperhatikan kekhususan dan sosial-budaya masing-masing daerah. Permasalahannya adalah bahwa kekhususan dan sosial-budaya daerah yang merupakan aspek dinamika masyarakat belum dimanfaatkan sepenuhnya sebagai potensi pembangunan.

Sesungguhnya kebudayaan memiliki *daya lenting* (fleksibilitas) atau kelenturan, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada. Yang perlu diperhatikan adalah arah dan laju perubahan akibat pembangunan, karena belum dapat diketahui titik nilai percepatan perubahan yang optimum dalam konteks ini, mungkin juga tiap daerah akan berbeda. Bila terlalu cepat, permasalahan yang timbul adalah kurang siapnya masyarakat sehingga menciptakan kesenjangan sosial-budaya. Sebaliknya bila terlalu lamban, juga menciptakan kesenjangan dengan daerah lain, dan menciptakan peluang konflik.

Konflik sesungguhnya merupakan unsur dinamis dari suatu masyarakat. Konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia. Di dalam masyarakat selalu ada konflik dan perdamaian, karena dalam suatu masyarakat juga terdapat pranata penyaluran rasa permusuhan yang dapat meredakan rasa permusuhan yang timbul (Coser 1976: 181-184). Tidak semua konflik berlanjut pada perang atau tindak kekerasan seperti yang terjadi di Poso. Menurut Koch perang atau kekerasan terjadi ketika tidak dicapai kesepakatan (1974: 164). Sedang menurut Webster konflik

adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau *perceived divergence of interest* (Pruitt & Rubin 2004). Meskipun demikian konflik merupakan faktor penting dalam dinamika masyarakat, tetapi konflik lebih sering menjadi kendala yang memperlambat proses pembangunan daripada sebagai potensi, karena itu perlu dipertimbangkan:

1. Bagaimana memanfaatkan dinamika sosial sebagai potensi dalam pembangunan?
2. Bagaimana memperkecil tingkat konflik dan manajemen konflik untuk dapat diarahkan sebagai potensi pembangunan?

Dinamika di dalam suatu masyarakat merupakan ekspresi dari eksistensi suatu masyarakat. Kondisi dinamis suatu masyarakat dituntut untuk menghadapi lingkungan, alam maupun sosial, yang selalu berubah. Oleh karena itu perubahan sosial merupakan peristiwa wajar, yang dapat menjadi modal bagi pemberdayaan masyarakat. Dinamika bukanlah sesuatu yang negatif, meski kadangkala arah perubahan bersifat negatif, misalnya gejolak sosial atau konflik, dan bencana yang menimbulkan gangguan sosial.

Mengenali dan memahami dinamika dalam suatu masyarakat merupakan strategi yang banyak membantu penerimaan masyarakat dan juga adaptasi masyarakat terhadap kegiatan pembangunan. Sebagai contoh dinamika negatif, yaitu konflik yang didalamnya menyangkut unsur kompetitif dapat dijadikan modal meningkatkan motivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Kondisi ini dapat dilihat dalam hubungan sosial antar kelompok masyarakat, atau antar kelompok pendatang dan penduduk asli. Dengan memanfaatkan dinamika yang ada dan diarahkan pada hubungan saling membutuhkan, diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan suatu daerah.

Dengan mengenali dan memahami dinamika sosial, dan kemudian memanfaatkan dalam kegiatan pembangunan, dapat membantu dalam

meminimalkan kemungkinan timbulnya konflik. Disamping kita dapat mencermati peluang kesenjangan yang terjadi di suatu wilayah, yang sering menjadi sumber dari timbulnya konflik antar kelompok atau etnik. Karena konflik sering terjadi akibat ketidak-sepahaman atau kesenjangan antar kelompok masyarakat, maka faktor pemerataan menjadi kunci dalam mengurangi kemungkinan konflik. Meskipun sebenarnya konflik sebagai salah satu bentuk dinamika sosial, dapat digunakan sebagai pendorong dalam proses pembangunan. Pengalaman kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wamena memberikan gambaran bagaimana dinamika sosial dimanfaatkan dalam mendorong pertumbuhan daerah. Dalam kasus ini manajemen konflik secara tradisional dijadikan wahana dalam mengatasi permasalahan konflik sehingga terhindar dari pecahnya konflik kearah kerusuhan atau perang antar kelompok masyarakat. Konflik yang menjadi bagian dari hubungan antara kelompok masyarakat diarahkan pada upaya menumbuhkan persaingan dan sekaligus kerjasama antar kelompok masyarakat dan antar etnik. Konflik yang kemudian berubah menjadi persaingan merupakan pendorong pertumbuhan daerah.

Terlepas dari itu semua, aspek pemerataan haruslah menjadi perhatian utama dalam setiap kegiatan pembangunan. Terutama di wilayah-wilayah dengan heterogenitas yang tinggi. Kondisi heterogen merupakan peluang konflik, oleh karena itu diperlukan kebijakan pembangunan yang memperhatikan pemerataan dengan asas keadilan, untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi-politik dalam suatu masyarakat.

Kelembagaan, Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Konflik Poso yang pecah pada akhir tahun 1998 hingga kini masih menyisakan derita. Ditambah lagi penyelesaian konflik yang hingga kini belum tuntas, berakibat pada ketidak nyamanan karena kurangnya rasa aman. Konflik yang terjadi telah

menanamkan trauma pada masyarakat, terutama yang menjadi korban langsung, yang hingga kini belum hilang. Kekhawatiran akan pecahnya konflik seperti yang pernah dialami masih tertanam di hati masyarakat Poso, diperkuat dengan masih seringnya terjadi insiden-insiden yang selalu dikaitkan dengan SARA seperti peristiwa pembunuhan, penembakan dan teror bom.

Trauma dan kekhawatiran masyarakat merupakan salah satu gambaran tentang kurangnya rasa aman. Kondisi seperti ini memerlukan penanganan yang hati-hati, karena trauma tidak mudah dihilangkan. Perlakuan khusus, seperti psikoterapi oleh psikolog yang khusus menangani trauma, diperlukan untuk paling tidak mengurangi trauma. Tetapi kondisi ini tidak mungkin hilang bila rasa aman belum terbangun di Poso. Rasa aman ini juga merupakan kunci bagi pemulihan kondisi sosial ekonomi Poso, sehingga proses pemulihan dapat cepat terlaksana. Tetapi untuk menumbuhkan rasa aman pada kenyataannya memerlukan waktu yang tidak singkat. Partisipasi masyarakat untuk membantu terciptanya rasa aman sangat berpengaruh. Kebersamaan yang kokoh diantara masyarakat akan dapat mengatasi berbagai permasalahan serta meminimalkan peluang konflik yang ada.

Masalah utama Poso yang kemudian mengemuka pada pasca konflik adalah relatif rendahnya ketahanan pangan masyarakat. Hal ini karena sebagian besar lahan pangan masyarakat turut hancur pada saat konflik pecah, dan terabaikan pada pasca konflik. Hingga awal tahun 2004 lahan pertanian yang ada belum diolah kembali, karena masyarakat masih belum merasa aman. Pada masa-masa itulah ketahanan pangan masyarakat menurun karena rendahnya kemampuan untuk menyediakan pangan. Ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari: (1) tersedianya pangan secara cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya; (2) aman; (3) merata; dan (4) terjangkau (Suryana 2003). Yang berarti kita harus selalu bisa memperoleh pangan yang kita butuhkan untuk dapat hidup aktif dan sehat. Tiga pilar ketahanan

pangan yang harus diingat adalah: ketersediaan pangan, kemudahan memperoleh pangan dan memanfaatkan pangan (Anonim).

Akibat konflik, maka kondisi ketahanan pangan seperti konsep di atas tidak lagi dapat dipenuhi. Meskipun untuk kehidupannya masyarakat memperoleh bantuan pemerintah (jaminan hidup) dan juga masih berproduksinya tanaman kakao yang turut hancur pada masa konflik. Tetapi kondisi ini tidak dapat dipertahankan terus menerus, masyarakat harus segera bangkit untuk membenahi perekonomian mereka dan mulai berproduksi agar tidak terus tergantung kepada bantuan pemerintah yang suatu saat akan dihentikan. Pada pertengahan tahun 2004 sebagian kecil masyarakat sudah mulai mengolah lahannya. Tetapi kondisi ini masih terganggu dengan insiden-insiden kecil yang sering terjadi, sehingga membuat masyarakat merasa ragu untuk memulai mengolah lahannya lagi.

Dengan kondisi tersebut, maka berbagai program pemberdayaan masyarakat sering terhambat. Mempertimbangkan masalah ini maka mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya menciptakan rasa aman merupakan prioritas. Tetapi hal ini tidak dapat dilakukan oleh perseorangan atau kelompok saja, melainkan perlu dukungan kelembagaan baik formal maupun informal. Karena melalui kelembagaan ini, ditarik partisipasi masyarakat sebesar-besarnya. Partisipasi masyarakat merupakan kunci dalam kegiatan pembangunan. Kelembagaan dalam konteks ini tidak selalu harus berwujud dalam suatu wadah, terutama kelembagaan informal. Dalam khasanah ilmu sosial, kelembagaan ini disebut dengan *pranata* atau dalam bahasa Inggris *institution*. Sedang *lembaga* yang umumnya diwujudkan dalam suatu wadah, merupakan terjemahan dari kata *institute*.

Pemberdayaan masyarakat yang merupakan inti dari pembangunan tidak terlepas dari peran pranata. Menurut Nicholson (1988: 4-5) *pranata berperan dalam memperluas pilihan bagi masyarakat dengan mempengaruhi ketersediaan informasi dan sumber daya, insentif, dan membangun aturan-aturan dasar transaksi sosial.*

Selain itu pranata berperan dalam penyebaran perubahan (hal baru) di masyarakat; merupakan seperangkat norma dan perilaku yang memenuhi tujuan dan kebutuhan bersama atau secara sederhana merupakan norma-norma dan pola nilai.

Pranata lebih menunjuk pada tipe hubungan sosial dan interaksi. Memanfaatkan pranata yang ada dalam suatu masyarakat akan membantu kelancaran suatu kegiatan. Karena melalui pranata yang ada, partisipasi masyarakat dapat ditarik sebesar-besarnya, sehingga kegiatan intervensi tersebut menjadi bagian dari masyarakat. Tetapi karena pembangunan adalah perubahan, melalui berbagai kegiatan intervensi, maka pranata yang ada di masyarakat tidak selalu dapat mengadaptasi perubahan yang terjadi. Dalam kondisi seperti ini, maka pranata baru dibutuhkan (Nicholson 1988). Namun demikian pengembangan pranata baru tidak dapat terlepas dari kebutuhan masyarakat atau kemanfaatannya bagi masyarakat yang bersangkutan. Sehingga masyarakat tidak merasakannya sebagai sesuatu yang asing. Dengan demikian partisipasi masyarakat melalui kelembagaan tidak hanya memberikan suatu kesempatan untuk mengembangkan suatu kebutuhan akan perubahan, tetapi juga memberikan kemampuan untuk bekerja atau mencari jalan untuk menyesuaikan dengan perubahan.

KELEMBAGAAN: PEMULIH SOSIAL EKONOMI PASCA KONFLIK SOSIAL

Budiawati S. Iskandar

Kelembagaan sosial merupakan bagian dalam perbaikan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang terkena bencana baik alam maupun sosial. Pentingnya kelembagaan sosial dilibatkan dalam pemulihan masalah sosial ekonomi belakangan ini menarik perhatian akademisi maupun pejabat pemerintah (Syahra 2003; Lubis 1999; Rudianto 2005). Kelembagaan dalam kesempatan kali ini diartikan sebagai pranata sosial yang berarti tradisi-tradisi yang ada dan berlaku dalam struktur-struktur dalam masyarakat (Suparlan 2005).

Pengaktifan pranata-pranata sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial ekonomi bukanlah merupakan sesuatu gejala yang baru sama sekali. Ahli-ahli ilmu sosial khususnya ahli antropologi telah lama mendeskripsikannya dalam laporan maupun tulisan ilmiahnya (Spradley 1980; Firth 1963). Dalam berbagai kajian tentang pranata-pranata sosial, manusia dilihat sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, melainkan hidup dalam pengelompokan sosial. Dalam suatu masyarakat biasanya terdapat lebih dari satu pengelompokan sosial, yang biasanya didasarkan pada kekerabatan, religi, politik, dan ekonomi (Henry 2001). Meskipun dalam prakteknya, anggota-anggota dari pengelompokan sosial tersebut dapat berganti-ganti. Misalnya anggota kerabat juga merupakan anggota kelompok religi yang sama. Seperti halnya yang hidup pada orang Phillipina, seorang pedagang di suatu pasar akan berkawan dengan sesama pedagang yang terkadang merupakan teman dari satu gereja yang sama dan dikenal dengan istilah *compadrazco* (Szanton 1963).

Pranata Sosial Ekonomi

Dalam kehidupan sosial suatu masyarakat, pengelompokan sosial yang anggotanya dapat berubah-ubah, bergerak mengikuti peran-perannya. Demi keterlanjutan kehidupannya, setiap anggota suatu pengelompokan sosial dalam suatu masyarakat selalu bekerja-sama, seperti dalam membangun rumah atau mempersiapkan upacara adat perkawinan. Seorang ahli antropologi yakni Malinowski (1918), menyatakan bahwa *setiap pranata mempunyai fungsi-fungsi sosial yang saling melengkapi*. Pandangan ini dikenal dengan aliran *fungsiionalisme*. Hampir senada dengan Malinowski, seorang ahli antropologi yang bernama Radcliffe Brown, menyatakan bahwa selain adanya fungsi yang dipraktekkan, fungsi-fungsi tersebut terwujud dalam struktur yang lebih dikenal dengan sebutan *struktur sosial*. Namun pada prinsipnya, kedua ahli antropologi tersebut berupaya membuktikan bahwa dalam kehidupan sosial, setiap anggota masyarakat selalu bekerja-sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka juga menyadari bahwa bentuk-bentuk kerja-sama yang diaktifkan dan dipraktekkan oleh setiap masyarakat belum tentu sama. Mengingat adanya sistem nilai, norma yang bervariasi atau berbeda-beda.

Dalam setiap kehidupan sosial, pranata sosial dipraktekkan dan didukung oleh setiap anggotanya termasuk didalamnya kehidupan ekonomi. Akan tetapi dalam perjalanannya, pandangan ahli antropologi tidak lagi mendapatkan perhatian. Perkembangan yang cepat di bidang teknologi menyebabkan pandangan ahli antropologi diabaikan dan seakan-akan tidak pernah ada. Hal itu diiringi dengan munculnya kebutuhan primer maupun sekunder yang berbeda, yang melibatkan perubahan pada tingkat kebutuhan sosial di berbagai negara khususnya negara yang sedang berkembang. Semenjak saat itu, pendekatan sosial dalam mengatasi berbagai masalah tergantikan oleh pendekatan yang lebih mengemukakan teknologi yang telah berhasil diterapkan di negara yang lebih awal berkembang. Masa ini dikenal dengan era *pembangunan*.

Awalnya program pembangunan yang ditawarkan oleh negara pengembang mendapatkan sambutan hangat oleh para pengambil kebijakan dan sebahagian akademisi yang mengkaji masalah teknologi. Namun permasalahan lainnya muncul seiring dengan keberhasilan program pembangunan yang justru memerlukan pengelolaan dengan biaya yang lebih mahal. Hal ini terjadi mengingat banyaknya penggunaan teknologi yang harus terus diperbaharui, dan sebagian besar masih tergantung pada negara maju sebagai penghasil teknologi. Permasalahan yang muncul dan sangat signifikan berpengaruh terhadap kehidupan manusia dalam konteks ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan. Kondisi ini terjadi karena orientasi model-model pengetahuan yang ada telah berubah yang berakibat pada (Suparlan 1999):

1. Peningkatan dalam pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya/energi dan lingkungan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestariannya.
2. Peningkatan jumlah penduduk, karena taraf kesehatan dan konsumsi yang lebih baik.
3. Turunnya angka kematian.
4. Beralihnya aturan yang bersumber pada pranata ke aturan yang berlandaskan hukum.
5. Terjadinya arus urbanisasi dan migrasi yang tidak terkontrol.
6. Peningkatan kejahatan, ketidak-jelasan antara milik umum/negara dengan hak pribadi yang menyebabkan terwujudnya ketidak-teraturan/ketertiban sosial.

Beberapa penyebab dari permasalahan di atas menurut Parsudi Suparlan (1999) dapat dikarenakan oleh berbagai hal, yaitu:

1. Perencanaan pembangunan lebih ditekankan pada pelaksanaan pembangunan ditingkat makro, sementara pembangunan ditingkat mikro diasumsikan akan

mengikuti dan sejajar dengan perkembangan yang terjadi sebagai hasil pembangunan ditingkat makro;

2. Perencanaan pembangunan lebih ditekankan pada pembangunan sektoral;
3. Dalam perencanaan pembangunan telah mengabaikan faktor-faktor sosial budaya;
4. Faktor aktor sebagai pelaksana program pembangunan.

Berangkat dari permasalahan yang muncul, akademisi maupun pengambil kebijakan mulai mengevaluasi program-program pembangunan yang terasa mandeg. Merekapun mulai merubah haluan program yang awalnya pembobotan utamanya lebih kuat dan condong pada teknologi, menjadi lebih banyak melibatkan manusia.

Dalam rangka peningkatan sosial ekonomi pasca bermacam permasalahan dan bencana guna kemaslahatan manusia sebagai mahluk sosial dirasakan perlu memahami kenyataan empirik menyangkut *ketahanan sosial* dan *modal sosial*. Secara kebahasaan ketahanan atau *resilience* didefinisikan sebagai kemampuan untuk memulihkan diri dari atau menyesuaikan diri terhadap nasib buruk atau perubahan, atau kemampuan sistem untuk mengatasi kejutan dan memulihkan diri. Singkatnya definisi tersebut menekankan pada kemampuan komuniti untuk melakukan tindakan yang disengaja untuk meningkatkan kemampuan pribadi maupun peningkatan kolektif di kalangan warganya dan lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat tersebut, untuk menanggapi dan mempengaruhi arah dari perubahan sosial dan ekonomi. Ketahanan sosial sebagai kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan menyiratkan pengertian bahwa yang dipertahankan adalah kemampuan untuk berubah, bukan semata-mata melestarikan suatu keadaan tertentu.

Dalam rangka pembangunan ketahanan sosial ekonomi masyarakat, modal sosial (*social capital*) seringkali menjadi salah satu faktor pilihannya. Modal sosial

secara umum didefinisikan sebagai jaringan atau hubungan kerja sama antar kelompok yang memudahkan orang melakukan tindakan kolektif untuk tujuan bersama. Hubungan-hubungan yang membentuk modal sosial tersebut (Woolcock 1999) mengikat para anggota suatu kelompok sosial (*bonding*), menghubungkan kelompok-kelompok dalam suatu masyarakat (*bridging*), dan menghubungkan kelompok-kelompok dalam suatu masyarakat itu dengan pihak-pihak di luar batas-batas masyarakatnya (*linking*). Hubungan yang demikian biasanya dilandasi atau menimbulkan rasa saling percaya yang kuat antar anggota kelompok atau anggota jaringan kelompok (Partha Dasgupta dan Ismail Seerageldin 2000). Dengan demikian modal sosial terdiri atas dua aspek yaitu norma-norma dan jaringan yang memungkinkan orang melakukan tindakan kolektif.

Khusus dalam kegiatan ekonomi, norma dan jaringan sosial memusatkan perhatian pada sifat penghubung yang khusus ada di antara individu-individu. Salah satu isunya adalah peranan individu yang dikombinasikan dengan fungsi pedagang perantara atau yang lebih populer dengan sebutan broker/bandar ekonomi dalam pengembangan fungsi penghubung. Kajian mengenai broker ekonomi bertujuan untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok dan individu yang menguasai perangkat hubungan penting yang menghubungkan ekonomi setempat dengan struktur wilayah atau yang lebih luas. Melalui perangkat ini, kita dapat mengkaji lebih lanjut mengenai mekanisme keuntungan ekonomi dan bagaimana keuntungan itu diinvestasikan, apakah terbatas pada tingkat lokal atau di luar wilayahnya. Melalui cara itu, kita bisa memberikan deskripsi mengenai ciri-ciri sosial dari bandar ekonomi, misalnya apakah mereka dapat disebut pengusaha lokal atau kosmopolitan (Paine 1963; Long 1972). Dalam kaitan ini beberapa hal yang perlu dipertanyakan adalah apakah mereka mampu melipat-gandakan keuntungan dari investasinya dibidang usaha yang digelutinya khususnya pertanian? Apakah dalam usahanya mereka mengadakan maupun menciptakan banyak kontak dengan berbagai orang maupun lembaga? Apakah mereka merupakan salah seorang yang mempunyai satu kedudukan di kegiatan politik ditingkat lokal atau yang

lebih luas? Singkatnya apakah jaringan sosial diaktifkan dalam kegiatan-kegiatan ekonominya?

Kajian Pranata Sosial

Kajian mengenai bandar ekonomi bukanlah suatu kajian baru. Beberapa ahli antropologi maupun sosiologi telah lama mengkaji kehidupan bandar. Para ahli yang telah lama mengkaji mengenai bandar antara lain: Geertz (1963), Cohen (1969), Long (1968) dan Parkin (1972). Dalam konteks yang berlainan hasil kajian mereka menunjukkan bahwa pengaktifan hubungan sosial dalam kehidupan sosial suatu masyarakat berdasarkan pada hubungan kekerabatan, afiliasi suku bangsa, ikatan keagamaan yang sama, *compadrazco* dan hubungan politik. Kajian-kajian tersebut umumnya dilakukan pada tingkat lokal atau ditempat mereka tinggal dan menetap. Tetapi ada juga yang melakukan kajian ditingkat yang lebih luas.

Sebagai contoh adalah hasil kajian Norman Long (1968) di Peru (Amerika Latin). Penelitian dilakukan dengan sasaran petani pemilik lahan yang juga mempunyai truk. Truk di wilayah ini merupakan sarana transportasi untuk transaksi niaga antara petani dengan konsumen di kota. Sebagai bagian dari anggota masyarakat pertanian, di antara mereka ada juga yang menjadi pengemudi truk tersebut. Sebagai pengemudi, mereka membawa hasil produksi pertanian dari perdesaan dengan menggunakan truk-truknya dan menyalurkannya ke pembeli borongan dan pembeli eceran di perkotaan. Di kota, para supir truk membeli atau mengangkut barang yang tidak terdapat di perdesaan dan menyalurkannya kepada para pembelinya. Melalui kegiatan tersebut, para bandar yang juga warga desa memanfaatkan pengetahuannya dalam mengaktifkan jaringan-jaringan sosial dengan orang-orang melalui hubungan saling percaya (*trust relationship*). Singkatnya, mengingat tidak semua petani mempunyai hubungan sosial dan

kekuatan informasi yang mengikatnya dengan orang di kota, maka mereka lebih banyak memberikan kepercayaan kepada bandar ekonomi untuk membantu menjual hasil produksinya. Adanya hubungan ketergantungan dan rasa percaya antara petani dengan pengemudi truk memberikan keuntungan sosial maupun keuntungan ekonomi. Selain ikatan ekonomi, ikatan lainnya yang mengikat mereka adalah ikatan perkawinan maupun ikatan politik.

Dari kajian tersebut dapat digambarkan bahwa dalam melakukan usahanya, para pengemudi yang juga penyalur produk pertanian lebih banyak menciptakan jaringan sosial dengan orang yang dipercayanya. Tujuan utama dari pemilihan orang-orang yang masih memiliki hubungan sosial dalam strategi pemasarannya adalah dalam upaya mengurangi resiko yang sering terjadi dalam transaksi dibidang perdagangan. Dengan hubungan seperti ini, selain masih saling kenal karena memiliki hubungan kekerabatan, mereka juga memperoleh keuntungan secara ekonomis maupun sosial.

Selain bandar ekonomi, pasar yang dalam tulisan ini lebih diartikan pada pasar tradisional, merupakan arena tempat melakukan transaksi baik ekonomi maupun sosial. Menurut Alexander (1980), pasar tradisional merupakan tempat pertemuan antara pedagang dan pembeli dalam melakukan proses jual – beli. Mengingat pasar tradisional kebanyakan terletak di perdesaan, seringkali antara warga pasar yang terdiri dari pembeli, pedagang, agen dan bandar masih memiliki hubungan kekerabatan, berteman di satu pengajian, merupakan anggota perkumpulan yang sama dan satu suku bangsa yang sama. Dalam bertransaksi, baik ekonomi maupun sosial, mereka menggunakan bahasa lokal. Oleh karenanya, proses pencapaian kesepakatan harga dapat merupakan suatu percakapan yang cukup panjang. Semakin sering seorang pedagang dan pedagang lainnya bertemu atau antara seorang pembeli dengan pedagang bertemu, maka lambat laun akan tercipta hubungan yang saling membutuhkan. Ada beberapa sebutan bagi hubungan yang tercipta antara pedagang dan pembeli, misalnya di Jawa Barat disebut

langganan, di Phillipina disebut *suki* dan di Haiti dikenal dengan istilah *pratik* (Szanton 1963; Supangkat-Iskandar 1998; Ortiz 1965).

Seperti halnya para bandar, hubungan antara pedagang dan pembeli di pasar Ujung Berung di Bandung banyak mengaktifkan jaringan sosial. Selain pedagang dan pembeli, warga pasar juga terdiri atas petugas pemerintah yang bertanggung jawab atas keseluruhan aktivitas maupun ekonomi pasar dan ada juga badan pelepas dana informal seperti rentenir maupun bank pasar. Demi mendapatkan keamanan, kenyamanan dan keuntungan, pranata-pranata tersebut mengukuhkan jaringan sosial. Tujuannya adalah untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang dapat merugikan keseluruhan pihak. Dengan kata lain, Alexander (1980) menegaskan bahwa pasar itu merupakan konstruksi budaya. Hal itu terwujud dari tingginya kepercayaan dan jaringan yang tercipta. Buktinya orang dapat membeli suatu produk tanpa harus membayar terlebih dahulu atau berhutang, dan pelunasan atas hutang dapat dibayar pada saat pembeli memiliki cukup uang. Untuk berhutang pun, seorang langganan tidak dibebani agunan, yang penting adalah hubungan yang baik (saling mengenal). Hampir di setiap pasar terdapat pola langganan seperti itu, hanya saja model jaringan yang terwujud dapat berlainan.

Kesimpulan

Meskipun kasus-kasus yang diangkat kedalam contoh bukanlah sesuatu yang spesifik mengenai dampak konflik atau keadaan pasca konflik, namun deskripsi menunjukkan bahwa sistem ekonomi dari suatu masyarakat yang sedang mengalami perubahan akan membutuhkan waktu yang lama. Karena konflik, dilihat dari ilmu sosial adalah salah satu proses perubahan. Pemulihan kembali ekonomi masyarakat atau warga yang terkena dampak merupakan suatu proses, yang memerlukan waktu cukup lama. Kegiatan yang bertujuan meningkatkan perekonomian, dalam antropologi dan sosiologi disebut sebagai proses ekonomi.

Selain itu, Bandar sebagai *agent of change* atau agen peubah bukan juga merupakan satu hal yang asing. Meskipun seringkali bandar mendapatkan konotasi negatif, namun dalam prakteknya bandar tidak selalu merupakan faktor yang merugikan. Mengingat bandar dapat memfasilitasi kebutuhan dari berbagai kebutuhan banyak orang dengan pengaktifan kemampuan merajut jaringan hubungan sosialnya dan membangun rasa percaya (*trust*) di antara banyak kalangan. Oleh karena itu pemanfaatan jaringan bandar dalam mewujudkan pemulihan ekonomi masyarakat dapat menjadi alternatif yang perlu dipertimbangkan. Dalam konteks ini, bukan "bandar" sebagai individual melainkan pranata-nya, yaitu jaringan yang dibangun bandar dalam kegiatan ekonominya.



MASYARAKAT POSO PASCA KONFLIK HARAPAN DAN TANTANGAN

Zulrizka Iskandar

Poso Pasca Konflik

Kondisi Poso pasca konflik belum dapat dikatakan telah normal. Beberapa bulan yang lalu, terutama pada bulan Nopember 2004, berbagai peristiwa yang bersifat teror telah terjadi. Seperti peristiwa pembunuhan terhadap Kepala Desa Pinedapa, Kecamatan Poso Pesisir Utara, yang bernama Carminalis Endeke, yang tewas dipenggal kepalanya pada tanggal 4 November 2004. Pada tanggal 8 Nopember 2004, Poso kembali dihebohkan dengan tewasnya sopir angkutan kota yang bernama Imbo. Imbo tewas ditembak oleh orang tak dikenal, di Kelurahan Madale, Kecamatan Poso Kota. Pada tanggal 13 Nopember 2004, Kota Poso diguncang oleh ledakan bom yang menewaskan 6 orang, di depan Pasar Sentral Poso. Demikian pula pada tanggal 28 Mei 2005, sebuah bom kembali meledak di pasar Tentena, Kabupaten Poso.

Indikator lain yang dapat dikatakan bahwa Poso masih belum normal adalah belum dapat kembalinya pengungsi ketempat tinggalnya semula. Mereka masih tinggal di kelompoknya sendiri. Pengelompokan ini berdasarkan pada agama. Dengan demikian, kondisi di Poso masih sangat rawan dan peluang munculnya konflik masih dimungkinkan. Ketidak serasian hubungan antar kelompok masyarakat berbeda agama sangatlah mudah memicu konflik. Walaupun masyarakat pada umumnya tidak menghendaki konflik tersebut terjadi kembali.

Teror bom yang berulang kali terjadi di Poso menyebabkan kecemasan masyarakat. Apabila dilihat dari korban yang jatuh yang kebanyakan dari warga nasrani, kondisi ini dapat memicu suatu prasangka terhadap kelompok Islam. Walaupun masyarakat tidak menghendaki konflik antar agama, tetapi dilain fihak terdapat kelompok yang berupaya dengan melakukan provokasi agar konflik dengan latar belakang agama kembali terjadi. Mengingat hal ini, maka isu konflik antar agama perlu segera ditangani, disertai membangun rasa aman pada masyarakat. Apabila rasa aman tersebut dapat dibangun, maka para pengungsi dapat kembali ketempat asalnya. Kembalinya para pengungsi ketempat tinggal semula sangatlah penting, karena pada saat ini lahan-lahan yang ditinggalkan memberi peluang munculnya isu konflik lain yaitu berkaitan dengan kepemilikan tanah.

Kondisi Psikologis Masyarakat Poso Pasca Konflik

Cukup banyak masyarakat Poso yang menderita depresi setelah terjadinya konflik. Dalam kondisi seperti ini, maka sulit bagi mereka untuk dapat hidup secara baik. Kondisi psikologis seperti itu akan mengganggu masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, sehingga kinerja yang dihasilkannya tidak optimal. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Kondisi Siswa di Poso Pasca Konflik

No	Tingkatan Trauma	Persentase
1	<i>Normal</i>	8,45%
2	<i>Mild to Moderate Depression</i>	38,03%
3	<i>Major Depression</i>	53,52%

Tabel 1 menggambarkan kondisi siswa sekolah di Poso ketika dilakukan konseling trauma ahli psikologi dari Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung. Konseling dilakukan pada bulan Oktober sampai desember 2004. Data

tersebut menunjukkan bahwa banyak siswa sekolah yang mengalami depresi berat, setelah terjadinya konflik. Besarnya jumlah siswa sekolah yang mengalami depresi tersebut dapat difahami karena setelah meletusnya konflik, secara psikologis mereka belum pernah ditangani dengan baik.

Berbagai permasalahan yang dirasakan oleh para siswa sekolah di Poso dapat merupakan cerminan tentang kondisi masyarakat Poso pada umumnya. Adapun permasalahan yang banyak dihadapi oleh para siswa sekolah di Poso terlihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Area Masalah yang dirasakan oleh Siswa di Poso

No.	Area-Area Masalah
1.	Motivasi belajar rendah
2.	Tingkat disiplin dan ketaatan rendah
3.	Perhatian mudah teralihkan saat mengikuti pelajaran
4.	Sulit menangkap pelajaran saat guru menerangkan
5.	Rasa aman yang rendah, seperti mudah gelisah, tidak tenang, dan takut, (terutama terbangkitkan kembali sesudah kejadian pembunuhan, penembakan dan ledakan bom di Pasar Sentral)
6.	Perencanaan dan manajemen waktu dalam belajar rendah
7.	Emosi negatif berlebihan
8.	Tingkat agresifitas yang meningkat, mudah mengekspresikan kemarahan dan ketidaksetujuan secara frontal
9.	Keberaksaraan, seperti kemampuan membaca dan menulis, mengemukakan pendapat dan berkomunikasi dalam konteks pendidikan terbatas dan kurang dikembangkan
10.	Daya ingat rendah akibat mudah teralihkannya perhatian
11.	Prestasi belajar di bawah rata-rata
12.	Kemampuan mengungkapkan ide dan gagasan terbatas, kurang keberanian untuk menyampaikan pendapat.
13.	Kurang dapat bergaul dengan sesama siswa dan guru secara harmonis
14.	Kemampuan menampilkan dan mengekspresikan diri dalam kegiatan kelas dan sekolah terbatas

Permasalahan yang timbul akibat konflik (Tabel 2) perlu menjadi pertimbangan dalam upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi di wilayah Poso. Terutama bila akan melakukan kegiatan intervensi sosial. Walaupun permasalahan tersebut merupakan hasil penelitian pada siswa sekolah, tetapi terdapat beberapa permasalahan yang juga dirasakan oleh masyarakat pada umumnya.

Permasalahan yang berkaitan dengan perilaku antara lain adalah masalah disiplin. Selama terjadinya konflik dan pasca konflik sudah barang tentu tatanan sosial menjadi rusak, sehingga peraturan banyak yang tidak lagi diikuti. Berdasarkan kondisi ini nampaknya penegakan aturan perlu dilakukan ulang. Namun demikian, upaya ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama, karena pada saat ini kondisi di Poso masih belum mendukung. Disiplin untuk melakukan pekerjaan dapat dilaksanakan apabila kondisi keamanan telah kondusif, dan masyarakat telah dapat kembali ketempat asalnya atau kerumahnya sendiri. Banyak pengungsi yang belum kembali ke tempat asalnya, walaupun mereka tidak lagi di tempat penampungan pengungsi. Masyarakat yang menjadi korban konflik tinggal di suatu tempat berdasarkan kelompok agamanya. Rumah yang ditinggalkan kemudian digunakan sebagai tempat pengungsian dari kelompok masyarakat lainnya.

Masyarakat Poso merupakan masyarakat yang heterogen, sehingga mengembalikan rasa aman pada penduduk masih memerlukan waktu. Kecurigaan masih mewarnai kehidupan masyarakat Poso. Teror yang masih terus berlangsung di Poso, mengakibatkan kondisi emosi masyarakat menjadi sangat peka. Agresifitas masyarakat masih mudah terpicu yang ditunjukkan oleh sikap mudah marah. Hal ini terkait dengan rendahnya tingkat rasa aman di masyarakat, ketakutan akan terjadinya pembunuhan masih menghantui masyarakat. Kondisi demikian perlu diatasi terlebih dahulu. Atau dengan perkataan lain, untuk saat ini kehidupan rutin masyarakat Poso belum dapat berjalan kembali secara normal seperti sebelum terjadi konflik.

Kegiatan intervensi yang melibatkan masyarakat, seperti pelatihan, perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai implikasi dari konflik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah:

1. Terbiasanya masyarakat di Poso untuk mendapatkan uang saku yang cukup besar ketika mengikuti pelatihan. Hal ini tentunya kurang mendidik, karena partisipasi mereka dalam suatu kegiatan pelatihan hanyalah untuk memperoleh uang saku yang cukup besar. Kondisi demikian mungkin terjadi karena setelah terjadinya konflik, mata pencaharian masyarakat belum dapat berjalan seperti sediakala. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kepada masyarakat perlu ditanamkan kebutuhan yang sifatnya internal agar pelaksanaan suatu program tidak dipandang sebagai masalah untung atau rugi, tapi lebih kepada manfaat kegiatan sebagai upaya menyiapkan sumber daya manusia di Poso untuk masa mendatang.
2. Adanya pola pikir di masyarakat bahwa kejadian di Poso lebih banyak disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi yang kurang baik, sehingga kondisi ekonomi perlu diperbaiki. Untuk itu perlu membangkitkan dan mendorong masyarakat agar dapat meningkatkan kinerjanya. Pemahaman demikian pada saat ini tidak sepenuhnya benar. Memang benar kondisi sosial ekonomi belum pulih, tetapi untuk mengatasi konflik yang ada pada saat ini tidak cukup dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena permasalahannya telah berkembang menjadi lebih kompleks.
3. Antar kelompok masyarakat yang berbeda agama masih saling curiga. Kecurigaan yang terjadi di masyarakat di dukung oleh berbagai peristiwa teror yang terjadi akhir-akhir ini. Korban dari teror tersebut lebih banyak dari kaum nasrani. Selain itu, para pengungsi masih belum kembali ketempat tinggalnya semula dan masih bergabung dengan sesama umat (kelompok dengan latar

belakang agama yang sama). Dengan kondisi ini potensi konflik masih tinggi karena rasa aman pengungsi tidak dapat dijamin. Oleh karena itu, masyarakat sangat berperan untuk mengembalikan kondisi Poso pada suasana kerukunan beragama.

4. Banyaknya korban teror dari warga Nasrani, seperti pembunuhan, penembakan, dan peledakan bom masih ditanggapi secara emosional oleh umat nasrani. Emosi yang negatif tersebut akan memperkuat munculnya suatu prasangka terhadap kelompok Islam. Dalam mengatasi permasalahan ini, tokoh-tokoh agama perlu duduk bersama, dan membuat kesepakatan untuk melakukan rekonsiliasi.

Dengan berbagai peristiwa tersebut, trauma yang dialami warga Poso masih belum dapat dihilangkan. Sepanjang kondisi trauma ini belum terselesaikan, maka kinerja masyarakat belum dapat diharapkan secara optimal. Kondisi ini mengganggu interaksi sosial antar berbagai kelompok masyarakat, sebagai akibat trauma berat yang dialami. Asumsi ini berdasarkan pada terbatasnya penanganan trauma terhadap korban konflik, yang saat ini baru terbatas kepada siswa dan guru. Sedangkan anggota masyarakat lain yang mengalami trauma pada umumnya masih tetap belum tertangani.

Kecurigaan diantara anggota masyarakat masih terjadi. Anggota masyarakat yang mengalami trauma belum mendapatkan bantuan, tetapi berbagai peristiwa teror terjadi berulang kali. Peristiwa teror tersebut akan menambah atau meningkatkan potensi konflik di Poso. Oleh karena itu, agar masyarakat dapat berpikir secara positif, maka penanganan trauma akibat konflik perlu dilakukan bersamaan dengan program kemasyarakatan lainnya.

Pemulihan Kondisi Poso: Suatu Harapan dan Tantangan

Untuk dapat mengatasi konflik yang terjadi di Poso harus disertai oleh perasaan optimistik, bahwa masalahnya dapat diselesaikan. Sudah barang tentu sangatlah diharapkan kehidupan masyarakat yang sehat di Poso dapat diwujudkan kembali. Apabila masalah konflik ini tidak terselesaikan, maka kualitas kehidupan masyarakat Poso akan mengalami penurunan. Artinya, berbagai ketertinggalan yang dialami masyarakat Poso, dibandingkan dengan masyarakat daerah lain, akan terjadi. Kondisi sosial demikian akan menimbulkan permasalahan tersendiri. Disamping dendam yang dirasakan oleh korban konflik akan menurun kepada anaknya, meskipun tidak terlibat langsung dalam konflik. Oleh karena itu upaya mengatasi konflik selayaknya menjadi perhatian utama dalam setiap upaya pemulihan wilayah Poso.

Untuk menangani konflik yang terjadi di Poso, perlu dilakukan pemetaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat dalam konflik. Pemetaan juga memuat informasi derajat konflik, karena terdapat terdapat gradasi dalam konflik, yaitu kelompok masyarakat yang terlibat langsung dalam konflik dan kelompok masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam konflik. Salah satu penyebab terjadinya konflik adalah adanya hubungan "power" yang asimetris. Dalam arti, ada pihak yang merasa memiliki "power" lebih dari yang lain, dan kondisi ini kemudian dapat memunculkan situasi konflik. Melalui pemetaan, dapat diketahui dan difahami pokok permasalahannya sehingga dapat diupayakan penyelesaiannya. Asumsi dari penyelesaian konflik tersebut adalah bahwa kelompok masyarakat yang terlibat konflik ringan akan lebih mudah terselesaikan bila dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang terlibat konflik berat.

Konflik yang disertai dengan kekerasan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Johan Galtung dapat dibedakan kedalam tiga bentuk, yaitu:

1. *“Direct Violence”*, mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Sebagai misalnya adanya rezim yang berusaha menekan kelompok lain, maka tindakan yang menekan tersebut dapat dikategorikan sebagai *direct violence*.
2. *“Structural Violence”*, terjadi karena adanya ketidak-seimbangan dalam struktur sosial. *Structural violence* dapat disebabkan oleh adanya ketidakadilan dalam pengadilan, perbedaan jenis kelamin, agama, rasial, bahasa, dan ekonomi.
3. *“Cultural Violence”*, tindak kekerasan ini dapat dilihat dalam bentuk ideologi, dan simbol-simbol bahasa.

Berbagai pertemuan antar kelompok masyarakat yang terlibat konflik harus dilakukan melalui proses mediasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang terlibat konflik. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut dilakukan dialog untuk saling memahami pihak lainnya. Masing-masing pihak perlu mengetahui sebetulnya apakah akar permasalahan dari konflik yang terjadi menurut versi masing-masing pihak. Apakah betul penyebab konflik itu adalah karena agama? Apakah konflik yang terjadi karena ada pihak luar yang memprovokasi? Dialog tersebut dilakukan dengan tujuan mencari pemahaman yang sama dalam menentukan penyebab konflik, yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah komitmen bersama.

Mediator yang menjadi perantara bagi masyarakat Poso yang terlibat konflik tentunya harus bersikap bijak. Mediator tidak boleh memihak, dan dapat dipercaya oleh kedua belah pihak yang terlibat konflik sebagai pihak yang netral. Didalam proses mediasi, mediator harus mengarahkan kepada kebutuhan yang dirasakan dan minat yang diperlukan dari kedua belah pihak. Mediator tidak boleh melakukan

dialog yang mengarahkan pada kejelasan posisi dari masing-masing pihak. Dengan adanya kebutuhan dan minat yang diarahkan pada kebutuhan dan minat yang sama, maka interaksi diantara kedua belah pihak dapat dikembangkan.

Setelah dicapai pemahaman yang sama, kemudian perlu dilanjutkan dengan suatu tindakan nyata. Salah satu upaya adalah mengembalikan pengungsi ketempat tinggalnya semula. Untuk rekonstruksi rumah tinggal yang hancur akibat konflik perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Proses pengembalian pengungsi perlu dilakukan agar tidak menimbulkan konflik lainnya, seperti misalnya konflik kepemilikan tanah.

Apabila proses mediasi tersebut dapat berhasil dengan baik, maka perlu ditindak lanjuti dengan suatu kegiatan yang disebut dengan "*peace building*". Didalam *peace building*, dilakukan proses pembentukan sikap berdamai pada masyarakat Poso. Pembentukan sikap berdamai perlu ditanamkan kepada seluruh masyarakat yang terlibat konflik tersebut. Pembentukan sikap berdamai, harus diikuti dengan proses pengembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lebih kondusif. Selama konflik berlangsung, masyarakat tidak dapat menjalankan kehidupan seperti biasa, misalnya bekerja, sehingga selama konflik penghasilan masyarakat sangat terganggu. Disamping itu, selama konflik berlangsung banyak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu didalam proses *peace building*, perlu diberikan pemahaman tentang hak asasi manusia. Dengan demikian diharapkan pada masa mendatang tidak lagi terjadi pelanggaran hak asasi manusia di daerah Poso.

Program *peace building* tersebut hendaknya dilakukan secara sistematis yang dilaksanakan langsung di masyarakat maupun melalui program pendidikan. Dari sektor pendidikan diberikan mata pelajaran *peace building* sebagai muatan lokal yang diwajibkan di daerah konflik. Ceramah atau penyuluhan tentang *peace building* di Poso hendaknya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Poso secara teratur.

Dengan demikian, sikap masyarakat terhadap perdamaian akan menjadi positif. Demikian pula dengan perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat Poso sebaiknya dilakukan oleh pemerintah daerah secara terpadu. Permasalahan yang muncul dalam konteks ini adalah mengapa penyelesaian konflik berlangsung berlarut-larut? Apakah dalam hal ini Pemerintah Daerah Poso mengalami kesulitan dalam melakukan rekonsiliasi? Apabila asumsi ini benar, maka nampaknya perlu bantuan dari pihak luar yang dinilai netral untuk dapat menangani konflik yang terjadi di Poso.

Daerah Poso merupakan daerah yang potensial secara ekonomi. Tetapi selama penyelesaian konflik belum tuntas, maka pengembangan potensi ekonomi Poso akan berjalan tersendat-sendat. Dalam konteks pembangunan nasional, ketertinggalan pembangunan di suatu daerah dapat menimbulkan kecemburuan dan menciptakan peluang konflik baru. Karenanya penyelesaian konflik di Poso merupakan keharusan dan menjadi tantangan bagi kita semua.

Peluang Pemulihan Poso

Konflik yang terjadi di Poso menanamkan trauma pada masyarakat Poso. Masyarakat melihat dan mengalami sendiri mereka kehilangan sanak saudara yang mereka cintai. Dengan pengalaman yang menakutkan tersebut, menimbulkan kondisi traumatik pada masyarakat Poso. Masyarakat yang trauma tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, dalam aktivitas bermasyarakat maupun dalam kegiatan perekonomian.

Kondisi Poso yang belum sepenuhnya pulih dari konflik ditunjukkan dengan masih adanya pengungsi yang tinggal di daerah bersama kelompok dengan latar belakang agama yang sama. Teror yang terus berlangsung sampai sekarang, menyebabkan perasaan negatif pada masyarakat terus berkembang. Prasangka

sosial dan kecurigaan masih berlangsung dengan intensitas yang tinggi pada masyarakat Poso. Kecurigaan antar anggota masyarakat yang berbeda agama, yaitu Islam dan Kristen, masih terus berlangsung. Kondisi demikian sudah barang tentu akan menghambat gerak pembangunan daerah.

Untuk itu konflik di daerah Poso harus segera diatasi. Proses rekonsiliasi perlu dilakukan dengan segera, agar tidak berkembang menjadi suatu gerakan separatis, karena merasa diperlakukan berbeda. Dengan melakukan proses mediasi yang melibatkan seluruh unsur masyarakat yang terlibat konflik, diharapkan dapat menyelesaikan konflik tersebut. Setelah terjadinya proses rekonsiliasi, perlu dilakukan aktivitas "*peace building*" di masyarakat, baik melalui sarana pendidikan atau penyuluhan langsung di masyarakat. Dengan berlangsungnya proses *peace building*, kegiatan pembangunan sosial ekonomi dapat diharapkan berjalan dengan baik.

PERAN DAN BENTUK KELEMBAGAAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT POSO PASCA KONFLIK

Syahyuti

Konflik Poso secara tidak langsung tampaknya bukan disebabkan karena adanya permasalahan ketahanan pangan di masyarakatnya. Namun, faktor ketahanan pangan mungkin menjadi penyebab dasar konflik yang terjadi. Lalu, jika ketahanan pangan dapat dicapai, apakah akan membantu menghindari konflik di masa selanjutnya?

Ketahanan pangan bukan hanya masalah “cukup makan”. Lebih jauh dari itu, pemenuhan hak atas pangan dapat dipandang sebagai salah satu pilar utama hak azasi manusia. Dalam PP No 68 tahun 2002, 30 Desember 2002, tentang Ketahanan Pangan, dinyatakan bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional untuk membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Jadi, meskipun tak ada konflik di Poso, membicarakan ketahanan pangan di wilayah manapun tetap saja relevan. Dalam konteks Poso rumusan kelembagaan ketahanan pangan harus sesuai dengan kebutuhan wilayah Poso dalam situasi pasca konflik. Opsi yang ditawarkan bukanlah satu-satunya pilihan tetapi dapat memberikan gambaran sehingga diharapkan dapat dikembangkan pada rumusan yang sesuai kebutuhan.

Kondisi Ketahanan Pangan di Indonesia

Permasalahan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia adalah fakta bahwa pertumbuhan permintaan pangan lebih cepat dari pertumbuhan penyediaannya. Secara agregat, ketersediaan pangan nasional dalam bentuk energi (Kkalori) menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dengan laju 4,3 persen per tahun pada kurun 1969-2001. Ketersediaan pangan siap konsumsi tahun 1969 hanya 124 miliar Kkalori, sedangkan tahun 2001 telah menjadi 361 miliar Kkalori. Dari beberapa komoditas utama, peningkatan dari beras hanya 3,3 persen/tahun, sedangkan dari jagung dan kedelai adalah 6,1 persen dan 7,3 persen/tahun (Saliem dkk. 2004). Secara umum, pertumbuhan penyediaan pangan dari beras paling rendah dibandingkan dengan jagung dan kedelai.

Dari sisi kemandirian pangan, secara agregat, tingkat ketergantungan pangan terhadap produksi domestik cukup stabil yaitu pada selang 94 sampai 96 persen. Artinya, tingkat kemandirian pangan kita cukup baik. Namun, ketahanan pangan secara nasional yang cukup baik ini tidak mampu menggambarkan tingkat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan individual yang sangat beragam menurut wilayah, kelas ekonomi, antar berbagai jenis pekerjaan, dan lain-lain. Sekalipun ketahanan pangan di tingkat nasional dapat dicapai, pada kenyataannya ketahanan pangan di beberapa daerah tertentu dan ketahanan pangan di banyak keluarga masih sangat rentan.

Ke depan, secara umum, keberlanjutan ketahanan pangan nasional cukup terjamin. Hal ini diindikasikan oleh nilai positif tren jangka panjang dari ketergantungan terhadap produk domestik, dan nilai negatif dari tren ketergantungan terhadap net-impor.

Ini adalah kondisi agregat nasional. Bagaimana dengan di Poso? Ketahanan pangan yang baik di tingkat nasional belum memberi informasi apa-apa terhadap ketahanan pangan di daerah, apalagi di tingkat rumah tangga. Bahkan di dalam

rumah tangga sendiri, tingkat ketahanan pangan untuk seluruh anggota keluarga juga tidak sama. Perempuan dan anak-anak biasanya merupakan kelompok yang paling rawan pangan dalam rumah tangga.

Masyarakat Poso dan Ketahanan Pangan

Masyarakat Poso sebagaimana masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya, merupakan masyarakat multi agama dan multi suku bangsa¹. Konflik Poso sesungguhnya adalah akibat kesenjangan politik pemerintahan dan kesenjangan sosial ekonomi (Susanto 2004). Ini dipicu oleh pergeseran kekuasaan dari masyarakat lokal ke suku pendatang, disertai dengan pergeseran ekonomi.

Dari studi yang dilakukan di Kecamatan Palolo Kabupaten Donggala, ketimpangan ekonomi antara suku asli (suku Kaili dan Kulawi) dengan pendatang (suku Bugis) terjadi karena perbedaan etos kerja, tingkat pendapatan rumah tangga, pola konsumsi, serta pelaksanaan pesta perkawinan dan upacara kematian. Lebih dahulu dan lebih terampilnya pendatang Bugis membudidayakan kakao menyebabkan semakin timpangnya pendapatan antar suku, sementara suku asli begitu mudah menjual tanah-tanahnya untuk keperluan pesta (Syahyuti 2002). Secara umum pola seperti ini pun terjadi di Poso.

Menurut Hari Susanto (2004), kesenjangan sosial ekonomi di Poso diawali dengan masuknya pendatang yang berasal dari Jawa, Bali, Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Utara dan Gorontalo yang memiliki daya juang tinggi. Ini menyebabkan terjadinya peralihan lahan dari penduduk asli ke pendatang, melalui transmigrasi maupun penjualan lahan-lahan dari penduduk asli. Arus migrasi masuk yang deras

1) Menurut Sensus Penduduk tahun 2000, dari total 2.012.393 penduduk Sulawesi Tengah, dua pemeluk agama yang terbesar adalah Islam (78,39 persen) dan 16,02 persen beragama Kristen Protestan. Dari sisi suku bangsa, dua suku pendatang terbesar adalah suku Jawa (8,25 persen) dan Bugis (14,39 persen).

terjadi semenjak 1970-an dan 1980-an karena program transmigrasi dan dibangunnya jalur Trans-Sulawesi.

Dikembangkannya tanaman bernilai ekonomi tinggi, kakao (coklat), dan kelapa (kopra) oleh para pendatang, telah memberikan peningkatan kesejahteraan para pemiliknya. Walau penduduk asli mengikuti pola tanam para pendatang untuk memperoleh hasil tanaman bernilai ekonomi tinggi itu, akan tetapi penguasaan pemasaran hasil-hasilnya dikuasai oleh para pendatang. Dalam konteks ini terdapat dua hal utama yang dirasakan penduduk asli akibat kehadiran para pendatang, yaitu beralihnya lahan pertanian mereka, dan margin yang diperoleh dari hasil pertaniannya lebih besar dinikmati pendatang. Padahal ini terjadi melalui mekanisme pasar yang adil, bukan pemaksaan secara politik.

Disebutkan bahwa, masyarakat Poso di pasca konflik secara umum menjadi semakin segregatif, dan terjadinya pengelompokan secara geografis, karena komunitas minoritas etnis atau agama tertentu mendekatkan diri dengan kelompoknya masing-masing. Ini tentu situasi yang sangat berbeda dengan kondisi sebelum konflik. Lalu, bagaimana sesungguhnya kecenderungan “*pasca konflik*” sekarang ini? Akankah struktur (kekuasaan) ekonomi dan politik akan kembali ke bentuk semula, atau ke bentuk baru? Hasil ini perlu menjadi pertimbangan dalam upaya pemulihan sosial-ekonomi Poso pasca konflik.

“Food Security” dan “Social Security”

Food security sesungguhnya telah ada dalam *social security*. *Food security* hanya salah satu kewajiban yang dikembangkan dalam sebuah *social security*. Jika ditelusuri ke belakang secara lebih luas, yaitu ke dalam ranah ilmu sosiologi, maka konsep “*food security*” dapat dicarikan penjelasannya dalam “*social security*” atau adakalanya disebut “*socio-economic security*”.

Ketahanan pangan adalah sesuatu yang multikonsep, serta didefinisikan dan diinterpretasi secara bervariasi. Namun, hasil akhir yang ingin dicapai cenderung lebih disepakati, yaitu “.... *the availability of adequate supplies at a global and national level; at the other end, the concern is with adequate nutrition and well-being*” (FAO 2003: 3). Jadi, yang ingin dituju adalah tersedianya pangan, tercukupinya kebutuhan gizi, serta tentu saja kesejahteraan. Ketahanan pangan memiliki tiga dimensi, yaitu ketersediaan (*availability*), akses (*access*), dan pemanfaatan (*utilization*).

Konsep ketahanan pangan sudah cukup lama bergulir. Pada tahun 1975, melalui suatu konferensi pangan, PBB mendirikan komite Ketahanan Pangan Dunia (*The Committee on World Food Security*). Pada *The World Food Summit*, November 1996, ditargetkan untuk tahun 2015 mengurangi setengah dari jumlah orang yang kekurangan pangan di dunia. Target ini kemudian diadopsi pula dalam pertemuan “*Millenium Summit*” tahun 2000 dan pada Konferensi bulan Juni 2002 di Roma dengan topik “*World Food Summit, Five Years Later*”.

Dalam setiap event terjadi perubahan dalam definisi *food security*. Pada tahun 1974 hanya fokus kepada jumlah dan kestabilan suplai pangan. Dalam *World Food Summit* tahun 1974 disebutkan, *food security* adalah: “*availability at all times of adequate world food supplies of basic foodstuffs to sustain a steady expansion of food consumption and to offset fluctuation in production and prices*” (United Nations 2003: 27). Lalu tahun 1983, FAO memperluas konsep di atas dengan memasukkan keamanan akses. Disini terlihat perhatian yang berimbang dari sisi *demand* dan *supply*. Tekanannya adalah kepada akses secara fisik dan ekonomi terhadap pangan utama. Definisinya menjadi: “*ensuring that all people at all times have both physical and economic access to the basic food that they need*” (FAO 1983). Di tahun 1986, karena pengaruh laporan Bank Dunia tentang “*Poverty and Hunger*”, maka lalu diperluas lagi dengan memasukkan kemiskinan, pendapatan, bencana alam, krisis ekonomi, dan konflik. Maka definisi ketahanan

pangan menjadi: *“access of all people at all times to enough food for an active, healthy life”*.

Pada periode 1990-an, ketahanan pangan telah menjadi perhatian yang penting, dengan perhatian dari individual sampai level dunia. Konsep ketahanan pangan lalu memasukkan keamanan pangan (*food safety*) dan kekurangan protein dan energi (*protein-energy malnutrition*) yang dibutuhkan untuk hidup yang aktif dan sehat. Aspek preferensi pangan (*food preferences*), sosial dan kultural ikut dipertimbangkan. Laporan Pembangunan Manusia UNDP tahun 1994 mempromosikan konsep *human security*, dimana ketahanan pangan menjadi salah satu komponen yang diperhatikan. Dalam definisi World Food Summit tahun 1996, disebutkan bahwa: *“Food security, at the individual, household, national, regional and global level (is achieved) when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life”* (FAO 1996).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, yang dimaksud dengan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Jadi, pada pokoknya, ketahanan pangan adalah tersedianya pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau, serta aman dikonsumsi. Jadi kuncinya adalah: ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pengadaannya.

Ketahanan pangan dapat dikembalikan dalam dua konteks: sebagai konsep dalam pembangunan, ataukah sebagai konsep dalam bantuan kemanusiaan (*humanitarian aid*) berupa program bantuan pangan (*food aid*). *Food aid* adalah satu paradigma yang memandang, bahwa *“... the solution to hunger is seen as being the donation of surplus food commodities, usually by rich developed nations”*. Sedangkan fokus *food security* sangat berbeda, yaitu *“... the development of*

indigenous mechanisms to fight hunger and malnutrition”, dalam konteks ini batasan dikembangkan dan kuncinya adalah pada “*indigenous mechanisms*” tersebut, yang didekati dengan “pendekatan kelembagaan”.

Petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan, karena petani adalah produsen pangan dan sekaligus juga sekaligus kelompok konsumen terbesar yang sebagian masih miskin dan membutuhkan daya beli yang cukup untuk membeli pangan. Petani harus memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan sekaligus juga harus memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri.

Keterjaminan keamanan sosial ekonomi (*socio-economic security*) dalam masyarakat adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan pemenuhan seluruh kebutuhan hidup warga, tidak hanya pangan. Garis batas terendah dari keterjaminan ini disebut dengan jaminan subsistensi. Pada masyarakat yang berbentuk komunitas, jaminan tersebut ada pada institusi desa. Jika tidak, mungkin ia berada di pundak kelompok-kelompok yang berdasar ikatan genealogis (kerabat dan suku).

Sudah lama ditemukan dalam penelitian sosiologi dan antropologi, bahwa setiap kelompok sosial yang pada dasarnya berprinsip sebagai *closed system* yang mandiri, akan mengembangkan seperangkat aturan yang akan menjamin kehidupan anggotanya. Hal ini merupakan fungsi pokok yang dijalankannya.

Dalam kelompok kekerabatan, keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*) merupakan dua kelompok sosial yang memiliki fungsi langsung dalam urusan mata pencaharian hidup anggotanya. Dalam kedua kelompok ini, terutama dalam keluarga inti, setiap individu dapat menikmati (bahkan menuntut) bantuan dari sesamanya untuk terpenuhinya keamanan dalam hidup (Koentjaraningrat 1974: 106). Mereka pada pokoknya terikat oleh suatu sistem hak dan kewajiban terhadap sejumlah harta produktif, harta konsumtif, atau harta pusaka yang tertentu.

Kelembagaan *social security* seperti ini juga dapat ditemui pada masyarakat yang dibentuk oleh ikatan teritorial (Scott 1981: 5-7), dimana desa menjamin kehidupan minimum warganya melalui berbagai pengaturan dengan mengedepankan prinsip mendahulukan selamat (*safety first*). Kondisi seperti ini misalnya dulu ditemukan di Jawa ketika masih berbentuk "*desa komunal*". Jaminan kehidupan minimum bagi seluruh warganya terasa melalui penjaminan dimana semua warga desa dapat mengambil bagian dalam proses produksi, dengan pembagian sebagai berikut: orang dari tingkat sosial terendah menerima bagian lebih kecil dibandingkan pemimpin desa dan anggota-anggota keluarga pendiri desa (Temple 1976: 20). Ini lah yang kemudian melahirkan "*sharing poverty*" dan involusi pertanian.

Bagi penduduk yang tersusun dari berbagai kelompok yang berbeda, misalnya kelompok suku, maka pembauran sosial (asimilasi) menuju terbentuknya suatu kolektivitas tidak terjadi secara serta-merta. Menurut Selo Soemardjan ketika pembauran tersebut belum terbentuk, maka masyarakat hanya mencapai tahap integrasi, dimana masing-masing hidup dengan identitasnya sendiri, namun hubungan kedua pihak dapat dilakukan dengan baik, saling menguntungkan dan saling isi. Dalam kondisi seperti ini institusi penjamin keamanan sosial ekonomi berada pada pundak kelompok-kelompok kekerabatan berdasarkan ikatan genealogis.

Untuk menemukan bagaimana "*rancang bangun kelembagaan*" yang dapat menjamin ketahanan pangan di Poso, maka perlu dipahami dulu dengan baik bagaimana pola *social security* selama ini. Pada studi di dua desa di Kabupaten Donggala, yang mungkin juga dapat memberi gambaran tentang masyarakat Poso secara mini, maka *social security* ada pada kelompok-kelompok kekerabatan. Meskipun mereka sudah 40 tahun tinggal bersama dalam satu desa, namun tetap mengandalkan ikatan-ikatan kesukuan dalam aktifitas ekonomi. Tingkat asimilasi dan akulturasi sangat rendah, dan belum terbangun *social security institution* yang multi suku (Syahyuti 2002).

Apa yang Dibutuhkan: Apakah “Kelembagaan”, “Social Network”, atautkah “Social Capital” ?

Jika dicermati, kata “kelembagaan” yang sering digunakan orang-orang (termasuk kalangan akademisi) sehari-hari tidaklah sama, dan juga tidak selalu sama dengan apa yang dibangun dalam ilmu sosiologi. Karena, di kalangan sosiologi sendiri pun belum sepakat bulat. Apa yang dimaksud dengan “kelembagaan” oleh seseorang mungkin yang ia bicarakan adalah *social network*. Atau, ketika seseorang mengatakan bahwa mereka membutuhkan sebuah kelembagaan, mungkin sesungguhnya cukup dengan penguatan “*social capital*” nya saja. Tanpa sadar, ketiga istilah ini, sering dipakai bolak-balik.

“Kelembagaan” merupakan satu konsep yang tergolong membingungkan dan belum memperoleh pengertian yang mantap dalam sosiologi. Istilah “kelembagaan” (*social institution*) selalu disilangkan dengan “organisasi” (*social organization*). *“What constitutes an ‘institution’ is a subject of continuing debate among social scientist.... The term institution and organization are commonly used interchangeably and this contributes to ambiguity and confusion”* (Uphoff 1986: 8), belum terdapat istilah yang mendapat pengakuan umum dalam kalangan para sarjana sosiologi untuk menterjemahkan istilah Inggris ‘*social institution*’. Ada yang menterjemahkannya dengan istilah ‘**pranata**’ ada pula yang menterjemahkannya sebagai ‘**bangunan sosial**’ (Soemardjan & Soemardi 1964: 61).

Dari perdebatan tersebut, dapat ditarik rumusan yang sesuai dengan kondisi (Syahyuti 2003). Dalam bahasa keilmuan, seluruh apa yang dikenal dengan organisasi formal dan nonformal, lembaga formal dan nonformal, institusi, asosiasi, maupun kelembagaan; dapat disebut dengan “kelembagaan”. Seluruhnya mengandung aspek yang sama. Dua aspek yang dimaksud adalah “aspek kelembagaan” dan “aspek keorganisasian”. Aspek kelembagaan terdiri dari hal-hal yang lebih abstrak yang menentukan “jiwa” suatu kelembagaan yaitu persoalan

nilai, norma, etika, dan berbagai aturan tertulis². Aspek kajian lebih jauh adalah tentang sistem kepercayaan, moral, ide, gagasan, doktrin, keinginan, kebutuhan, orientasi, dan lain-lain.

Sementara, aspek keorganisasian berupa sesuatu yang lebih statis yaitu struktur, penetapan peran, tujuan, keanggotaan, dan lain-lain. Fokus utama yang dipelajari adalah struktur, peran, aktivitas, hubungan antar peran, integrasi sosial, struktur umum, perbandingan struktur tekstual dengan struktur riil, struktur kewenangan kekuasaan, hubungan kegiatan dengan tujuan, aspek solidaritas, klik, profil, pola kekuasaan (sentralistis atau distributif), dan lain-lain.

Jadi, "kelembagaan" menunjuk kepada sesuatu yang bersifat mantap (*established*) yang hidup (*constituted*) di dalam masyarakat; Koentjaraningrat (1997) mengusulkan istilah pranata sebagai padanan kata "*institution*", dan pranata sosial untuk "*social institution*". Secara sederhana, kelembagaan adalah kelompok-kelompok sosial yang menjalankan suatu masyarakat. Ia ibarat organ-organ dalam tubuh manusia yang hidup dalam masyarakat. Setiap kelembagaan memiliki tujuan tertentu, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki pola perilaku tertentu serta nilai-nilai dan norma yang sudah disepakati yang sifatnya khas. Meskipun batasan kelembagaan dan organisasi berbeda-beda menurut berbagai ahli, namun apa yang dimaksud adalah merupakan suatu yang stabil, mantap, dan berpola; berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat; ditemukan dalam sistem sosial tradisional dan modern, atau bisa berbentuk tradisional dan modern; dan berfungsi untuk mengefisienkan kehidupan sosial.

Social network adalah peta kesaling-hubungan antar individu, yang menunjukkan cara mereka berkoneksi melalui berbagai tingkat keakraban sosial. Analisa *social networks*, yang adakalanya disebut "*network theory*", telah menjadi perhatian dalam perkembangan ilmu modern dalam bidang sosiologi, antropologi,

²) Misalnya Uphoff (1992) dan Fowler (1992), kelembagaan adalah "a complex of norms and behaviours that persist overtime by serving some socially valued purpose".

psikologi sosial, dan studi keorganisasian. *Social network* ada dalam berbagai level, mulai dari ikatan kekeluargaan sampai dengan negara. Ia memainkan peranan penting dalam memecahkan berbagai persoalan, dan menjadi dasar pengorganisasian masyarakat.

Teori *social network* memperhatikan dua hal, yaitu "*nodes*" and "*ties*". *Nodes* adalah individu-individu sebagai aktor yang ada di jaringan, dan *ties* adalah hubungan antara aktor-aktor tersebut. Dalam diagram *network*, *nodes* adalah titiknya, dan *ties* adalah garisnya.

Jika kita dapat menggambarkan bentuk *network*, maka akan sangat berguna dalam memecahkan jika ada satu individu atau keluarga yang kelaparan misalnya. Suatu *social network* didasari oleh *social contract*, yaitu suatu kesepakatan antar anggota dalam satu kelompok sosial, dengan menegaskan batasan hak dan kewajibannya.

Dalam "*social capital*", *network* merupakan modal utamanya. Konsep *human resources* atau *human capital* memperhatikan *nodes*-nya, sedangkan *social capital* memperhatikan *ties*-nya. Menurut World Bank (1988), *social capital* adalah "...a society includes the institutions, the relationships, the attitudes and values that govern interactions among people and contribute to economic and social development". Namun, *social capital* tidaklah sederhana hanya sebagai jumlah dari seluruh institusi yang ada, namun ia adalah juga semacam perekat yang mengikat semua orang dalam masyarakat. Dalam *social capital* dibutuhkan adanya "nilai saling berbagi" (*shared values*) serta pengorganisasian peran-peran (*rules*) yang diekspresikan dalam hubungan-hubungan personal (*personal relationships*), kepercayaan (*trust*), dan *common sense* tentang tanggung jawab bersama; sehingga masyarakat menjadi lebih dari sekedar kumpulan individu belaka.

Sekarang, dalam konteks Poso: apa sesungguhnya yang dibutuhkan? Sebuah kelembagaan? Cukup membangun *social network* saja? Atau, perlu penguatan

social capital dulu, sebelum sebuah kelembagaan baru (untuk menjamin ketahanan pangan) diintroduksikan? Hal ini diperlukan agar pelaksanaannya sesuai kebutuhan dan berdaya guna.

Langkah-Langkah Menyusun Sebuah Kelembagaan Ketahanan Pangan di Poso Pasca Konflik

Sebelum sampai kepada bentuk kelembagaan, perlu dijawab dulu beberapa pertanyaan pokok berikut:

1. Bagaimana kondisi ketahanan pangan yang terjadi? Atau, dengan bahasa lain, bagaimana tingkat kerawanan pangan yang dihadapi? Apakah cadangan pangan lokal cukup? Bagaimana pola konsumsi penduduk? Bagaimana daya belinya? Mungkin cadangan pangan dan daya beli cukup, namun terhalang masalah keamanan. Kalau ya, jika keamanan sudah pulih, maka tentu ketahanan pangan akan terbentuk dengan sendirinya.
2. Secara segmentatif, suku mana yang tingkat ketahanan pangannya yang paling rendah? Dimana posisinya? Di daerah terpencil, atau di tengah kota? Apa andalan sumber ekonomi rumah tangganya? Ketahanan pangan akan terbentuk dengan sendirinya, jika suatu rumah tangga memiliki sumber ekonomi dan pendapatan yang cukup, dan akses kepada pasar pangan.
3. Apa penyebab utama terjadinya atau potensi terjadinya kerawanan pangan? Jika alasannya adalah lemahnya akses terhadap sumber daya ekonomi seperti lahan garapan, akses pasar, dan akses permodalan; maka pemecahannya menjadi lebih jelas. Jika alasannya adalah sulitnya lapangan kerja, maka yang dibutuhkan tentu penciptaan lapangan kerja baru. Demikian pula, ketimpangan agraria antar lapisan dan antar suku, akan dapat diperbaiki dengan melakukan reforma agraria, misalnya dengan *landreform*.

4. Dalam kondisi pasca konflik saat ini, bagaimana cara penduduk memenuhi kebutuhan subsistensinya terhadap pangan? Apakah dipenuhi oleh pemerintah (jadup dan raskin), dipenuhi oleh kerabat sendiri, atau harus dipenuhi melalui pasar?

Jika disepakati untuk membentuk “kelembagaan ketahanan baru”, yang dapat disebut sebagai sebuah “*food security system*”, maka beberapa pertanyaan berikut dapat memandu bagaimana bentuk kelembagaan tersebut:

1. Apa tujuan kelembagaan? Hanya untuk mencukupi kebutuhan pangan sampai batas subsistensi, yaitu 2100 Kkal per individu per hari untuk orang dewasa? Atau lebih jauh dari itu? Apakah lembaga yang kita inginkan akan tetap eksis sampai ekonomi rumah tangga mantap?
2. Apa bentuk dasar kelembagaan? Apakah sebagai sebuah kelembagaan pelayanan (*charity*) belaka? Atau sebagai sebuah sistem ekonomi yang nantinya akan mengandalkan pada mekanisme pasar?
3. Siapa atau kelompok masyarakat apa yang dicakup dalam kelembagaan? Hanya rumah tangga rawan pangan yang berada di bawah garis batas subsistensi? Rumah tangga yang tidak memiliki lahan? Rumah tangga yang sampai sekarang belum bisa kembali ke tempat asal? Suku mana yang menjadi bagian kelembagaan? Ataupun semua suku?
4. Apa unit terkecil dalam kelembagaan? Rumah tangga, individu, atau kelompok suku? Mungkin rumah tangga dapat menjadi dasar yang lebih baik.
5. Apa dasar kelembagaan yang akan dibangun? Di dunia ini, semua kelembagaan dapat dibagi habis kedalam tiga kelompok yaitu: kelembagaan komunitas, kelembagaan pasar, dan kelembagaan pemerintah, pembedaan ini sangat penting (Uphoff 1986). Saat sebelum konflik, kerabat (kelembagaan komunitas) dan pasar telah mampu menjamin kebutuhan pangan minimal mereka. Saat di pengungsian, pemerintah perlu turun tangan. Saat pasca konflik, tentu kerabat belum sepenuhnya dapat menjamin karena dalam kondisi yang sama parah

dan belum memiliki pendapatan yang cukup; sedangkan ke pasar juga aksesnya belum terbuka. Karena itu, mungkin untuk sementara pemerintah masih harus berperan, untuk kemudian perlahan-lahan undur diri.

6. Kerawanan pangan hampir pasti akan dijumpai di rumah tangga miskin, kecuali dalam kondisi khusus misalnya di daerah konflik. Miskin, maknanya adalah rumah tangga tersebut tidak memiliki *link* ke lembaga pasar. Ia tidak mampu membeli pangan yang ada di pasar. Atau pasarnya tidak menyediakan dengan cukup. Dalam kondisi demikian, institusi penjamin keamanan pangan mungkin berada di garis primordial (lembaga komunitas). Atau di daerah konflik (= penampungan korban konflik) mungkin dijamin pemerintah. Kelembagaan ekonomi pada masyarakat miskin di antaranya adalah mengandalkan kepada kelompok kerabat dan komunitas (di desa), mengandalkan jaringan sesama okupasi (di kota), dan membuat kelembagaan pasar sendiri secara eksklusif yaitu menyediakan barang-barang dengan kualitas rendah, barang bekas, pembayaran secara kredit, tukar tambah barang, dan menghindari penggunaan uang tunai.
7. Bagaimana struktur kelembagaan yang akan dibangun? Apakah memusat di pemerintah daerah (Dewan Ketahanan Pangan) berbentuk piramida? Atau terdistribusi di jejaring komunitas melalui solidaritas *extended family*? Pada masyarakat yang sedang berkonflik, maka ciri-ciri masyarakatnya adalah: mengandalkan kerabat dan suku untuk keamanan, lebih percaya kepada kelompok yang sepihak dan curiga kepada pihak lain, menciptakan pasar secara terbatas, membangun pasar gelap, bersikap eksklusif, dan mungkin menurunkan moralitas untuk sesaat.
8. Apakah kelembagaan perlu dibangun secara berlapis? Bagaimana sistem komunikasi akan dibangun antar lapisan dan bagian? Bagaimana komunikasi secara horizontal dan vertikal?
9. Dari sisi waktu, sampai kapan kelembagaan ini akan hadir? Ini juga terkait dengan besarnya ukuran kelembagaan? Ketika situasi keamanan pangan masih parah maka ia besar, dan lama-lama mengecil. Atau bagaimana?

10. Untuk itu perlu ditetapkan indikator ketahanan pangan? Mana rumah tangga yang tergolong parah, sedang, atau sudah baik? Tiap level rumah tangga akan memperoleh perlakuan yang berbeda nantinya.

Berbagai pemmasalahan di luar kelembagaan tetap harus menjadi perhatian, diantaranya adalah pelayanan kesehatan murah, jaminan pendidikan, pembangunan fasilitas, serta tentu saja jaminan rasa aman. Pemerintah dan pasar juga harus berupaya agar ketahanan pangan pada tingkat wilayah terjamin, transportasi dan komunikasi lancar, dan berkembangnya aktifitas ekonomi lokal.

Karakter Khas Kelembagaan Ketahanan Pangan

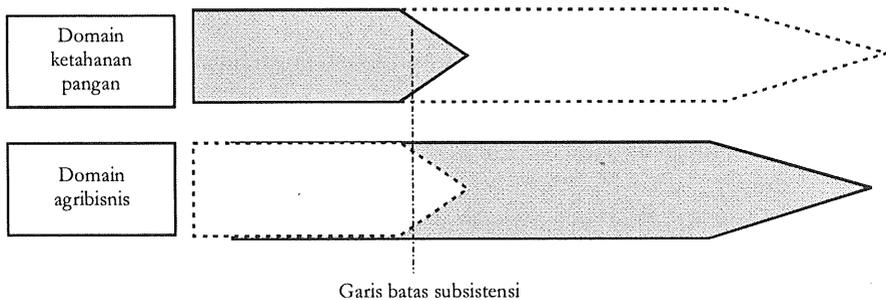
Dari penjelasan di atas, dapat dirumuskan apa sesungguhnya makna ketahanan pangan dalam permasalahan sosial ekonomi masyarakat secara umum. Pemahaman ini akan menentukan bagaimana bentuk kelembagaannya.

Mambangun ketahanan pangan di pedesaan khususnya tidak bisa dilepaskan dari upaya peningkatan ekonomi pedesaan, peningkatan produktifitas pertanian, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan peranan berdasarkan jender, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang murah, dan lain-lain. Jika hal-hal di luar masalah ketahanan pangan dapat dibangun, maka ketahanan pangan akan terbentuk dengan sendirinya.

Karena itu, dalam kondisi normal, sesungguhnya tidak perlu ada kelembagaan ketahanan pangan secara eksklusif. Jadi, jika kita ingin membangun kelembagaan ketahanan pangan, maka itu haruslah dipandang sebagai temporal dan segmentatif. Tingkat keamanan pangan akan sangat berbeda antar rumah tangga, antar lapisan, antar lokasi geografis, dan lain-lain.

Jika dibedakan menurut level aktifitas ekonomi, maka permasalahan ketahanan pangan berada dalam konteks “ekonomi subsistensi”. Jika sudah lepas dari itu, maka kita akan berada dalam konteks “ekonomi ekspansi”. Bentuk kelembagaannya akan sangat berbeda. Di Departemen Pertanian, dikenal dua program, yaitu program ketahanan pangan dan program agribisnis.

Ketahanan pangan adalah permasalahan di bawah dan sampai kepada garis batas subsistensi. Namun, pada level yang lebih maju, yang sesungguhnya sudah masuk ke domain agribisnis, kondisi ketahanan pangan semakin baik. Jadi pada setiap level ekonomi rumah tangga, ketahanan pangan dan agribisnis tetap dibicarakan, namun berbeda tekanan, dapat dipandang sebagaimana gambar berikut:



Bentuk kelembagaan pada setiap level sangat berbeda. Pada rumah tangga yang kondisinya masih tergolong di bawah garis subsistensi, maka keluarga dan kerabat (kelembagaan komunitas) menjadi bagian pokok kelembagaannya. Sementara, jika kondisi rumah tangga sudah melampaui garis subsistensi, maka kelembagaan pasar yang menjadi andalannya, bahkan interaksi dengan kerabat mulai bercorak pasar (semakin “hitungan-hitungan”). Dalam kondisi di bawah batas subsistensi, pemerintah harus memainkan peranan aktif melakukan peran pelayanan dan intervensi, namun setelah itu pemerintah semakin kurang dibutuhkan. Pemerintah cukup melakukan regulasi, pengawasan, dan penyediaan infrastruktur.

Dalam Pasal 8, PP No 68 tahun 2002, masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan cadangan pangan masyarakat, yang dapat dilakukan secara mandiri serta sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selanjutnya juga disebutkan bahwa, penyaluran pangan secara khusus akan dilakukan apabila terjadi ketidak-mampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan melaksanakan bantuan pangan kepada penduduk miskin.

Berdasarkan PERDA No. 4 Tahun 2001 tanggal 15 Maret 2001 di Sulawesi Tengah telah terbentuk Badan Ketahanan Pangan atau (BKP)³ yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi. Tugas pokoknya yaitu membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang ketahanan pangan. Tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan propinsi adalah:

1. Mengidentifikasi kebutuhan produksi dan konsumsi pangan.
2. Mengkaji, memantau, mengendalikan ketersediaan dan kecukupan pangan, kewaspadaan pangan dan gizi serta panganekaragaman pangan.
3. Mengembangkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan serta kerawanan pangan dan gizi keamanan bahan pangan.
4. Mengawasi, memantau dan mengendalikan mutu dan keamanan bahan pangan.
5. Memantau dan mengevaluasi pengelolaan penyaluran komoditas pangan strategis.
6. Melaksanakan penyuluhan dan gerakan peningkatan mutu konsumsi dan panganekaragaman pangan.
7. Mengkaji dan memantau harga pangan strategis serta mengembangkan sistem informasi ketahanan pangan.

³⁾ <http://www.bkpsulteng.go.id/news.php>

8. Mengembangkan, memantau dan mengevaluasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
9. Menyiapkan bahan koordinasi untuk peningkatan ketahanan pangan.
10. Melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi, bantuan yang akan dilimpahkan/ diberikan oleh pemerintah pusat.

Di Kabupaten Poso, Dewan Bimas Ketahanan Pangan dibentuk atas dasar SK Bupati No. 188.45/1196/2001 Tanggal 30 April 2001.

Kesimpulan

Sebelum membangun kelembagaan ketahanan pangan di Poso dalam kondisi pasca konflik, perlu dipahami secara baik *setting* masyarakat yang sedang terjadi, yaitu bagaimana kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang sedang berjalan. Permasalahan ketahanan pangan, dalam makna kebutuhan subsistensi, hanyalah sub bagian kecil (mungkin) dari struktur masyarakat di wilayah tersebut. Karena apabila kondisi dapat kembali normal, dalam arti aktivitas sosial ekonomi dapat berjalan dengan baik, maka ketahanan pangan akan terbentuk dengan sendirinya.

Implikasinya, kelembagaan ketahanan pangan pun, harus dipandang sebagai bagian dari sistem yang lebih luas. *Environmental institution* harus cukup kondusif sehingga kelembagaan dimaksud dapat berjalan. Karena, kelembagaan apapun tidak hidup di ruang hampa. Kelembagaan di dalam masyarakat, apapun jenis dan tujuannya, hanyalah ibarat sebuah organ dalam tubuh manusia.

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN POSO PASCA KONFLIK

Savitri Dyah W.I.K.R.

Upaya pemulihan kondisi ekonomi wilayah, merupakan fokus utama kegiatan pembangunan di Kabupaten Poso pasca konflik, dengan masih mengandalkan sektor pertanian karena potensinya yang tinggi. Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui implementasi teknologi tepat guna merupakan *action research* yang dilaksanakan oleh LIPI di wilayah ini sebagai kontribusi LIPI dalam upaya membantu pemerintah daerah memulihkan kondisi sosial-ekonomi wilayah. Melalui pendekatan ekonomi dengan asumsi kegiatan ekonomi produktif dapat membantu pemulihan ekonomi masyarakat dan mendorong pada terjalannya kerjasama antara kelompok-kelompok masyarakat yang ada berbasis kepentingan dan kemanfaatan bersama, secara tidak langsung akan dapat mengurangi potensi konflik yang ada. Dengan pertimbangan tersebut kegiatan difokuskan pada kegiatan produktif berbasis *agroindustri*. Melalui pengenalan dan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG), hasil pertanian yang belum optimal pengolahannya dapat lebih ditingkatkan produksi serta nilai tambahnya. Hal ini dilakukan karena selama ini produksi pertanian yang dihasilkan dikonsumsi atau dijual langsung tanpa proses pengolahan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat bertujuan agar masyarakat dapat menolong diri sendiri dan mampu mengembangkan wilayahnya. Dengan prinsip tersebut kegiatan diarahkan pada *income generating activities* melalui optimasi SDA dan SDM, dengan tetap mempertimbangkan potensi serta peluang yang ada serta memperhatikan permasalahan yang muncul, agar dicapai efektifitas kegiatan. Kegiatan yang intinya adalah alih teknologi dilaksanakan melalui penyelenggaraan

pelatihan yang merupakan kunci bagi terjadinya proses alih teknologi. Dalam pelatihan disampaikan hasil-hasil penelitian, teknologi, informasi yang relevan kepada masyarakat (melalui kader yang telah diseleksi) untuk dapat dimanfaatkan dan dikembangkan bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan wilayah. Pelatihan didukung pula dengan *pendampingan* melalui *monitoring* dan *evaluasi* serta *technical assistance* (bantuan teknik), sehingga informasi dan pengetahuan yang telah disampaikan benar-benar dipahami dan dapat diterapkan dengan baik oleh para kader yang telah dilatih. Selain itu agar hasil pelatihan betul-betul dapat bermanfaat, maka selain dilakukan seleksi kader yang akan dilatih, pelatihan juga dilakukan secara berjenjang. Kader yang berpotensi kemudian dilatih lebih lanjut untuk lebih ditingkatkan keterampilannya. Sesuai dengan tujuan kegiatan maka setelah pelatihan kemudian dibentuk kelompok usaha dengan memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan.

Karena luasnya lokasi kegiatan, dan terbatasnya personal dan agar kegiatan yang dikenalkan berhasil guna maka diterapkan prioritas. Prioritas lokasi didasarkan pada aksesibilitas serta fokus pada wilayah eks kerusuhan. Dengan batasan tersebut maka lokasi kegiatan difokuskan di Poso Kota serta wilayah eks kerusuhan Kecamatan Poso Pesisir. Dengan merangkul wilayah eks kerusuhan, misi kegiatan selain pemulihan ekonomi masyarakat dan wilayah juga mempersatukan kembali kelompok-kelompok masyarakat yang pernah terpisah akibat kerusuhan lalu.

Mengingat pada kondisi ekonomi serta situasi sosial politik lokasi, dalam menjalankan kegiatan kehati-hatian menjadi sangat penting, terutama karena dalam pelaksanaan kegiatan selalu melibatkan masyarakat dari berbagai kelompok yang berbeda agama serta etnik. Selain itu tim LIPI sebagai pelaksana di lapangan juga harus siap dan waspada menghadapi situasi sosial-politik di lokasi agar dengan cepat dapat mengambil keputusan dan mengatasi kondisi yang sering secara tiba-tiba menjadi tak terkendali. Kesiagaan dalam hal ini mencakup: 1) pengetahuan geografi wilayah sehingga mengetahui alternatif jalan keluar dari wilayah Poso

bila kondisi tidak kondusif, 2) ketersediaan dana yang cukup bila harus keluar dari wilayah Poso secara mendadak, 3) menjalin hubungan baik dengan berbagai kelompok: masyarakat, aparat pemerintah daerah dan pihak keamanan, dan 4) akses terhadap informasi sosial-politik di lokasi sekitar base camp LIPI dan Poso secara umum. Pelibatan lembaga dan organisasi lokal menjadi penting, selain untuk memperlancar kegiatan, menjamin keamanan, juga sebagai jaminan keberlanjutan kegiatan (*sustainability*).

Sekilas Kabupaten Poso

Secara umum Kabupaten Poso memiliki potensi yang cukup besar terutama di sektor pertanian dan perikanan (kelautan), tetapi juga menghadapi berbagai permasalahan yang berakibat pada relatif lambannya pertumbuhan daerah. Wilayah kabupaten ini meliputi daratan dan pulau-pulau kecil yang berjumlah sekitar 81 pulau yang sudah bernama, dan yang berpenghuni berjumlah sekitar 40 pulau. Kabupaten Poso terletak antara 0°06'56" - 3°37'41" lintang selatan dan 120°05'25" - 123°06'17" bujur timur. Luas wilayah mencapai 14.433,76 Km² atau 21,22% dari luas daratan Propinsi Sulawesi Tengah. Secara administratif wilayah ini berbatasan dengan Teluk Tomini dan Propinsi Sulawesi Utara di sebelah utara, propinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Morowali di sebelah selatan, Kabupaten Banggai dan perairan Teluk Tolo di sebelah timur, serta Kabupaten Donggala di sebelah barat. Wilayah yang cukup luas ini terdiri dari 13 kecamatan. Populasi wilayah ini di tahun 2000 berjumlah 231.898 jiwa terdiri dari laki-laki berjumlah 118.997 jiwa dan perempuan 112.901 jiwa, dengan kepadatan penduduk mencapai 16 jiwa/Km², dengan persebaran tidak merata dan umumnya terpusat di kota kabupaten.¹

¹) Data masih bersumber pada BPS tahun 2001, karena hingga kini belum terdapat data baru, termasuk dengan telah dimekarkannya wilayah ini dimana 7 kecamatan disebelah timur menjadi kabupaten baru sejak awal tahun 2004, yaitu Kabupaten Tojo Una Una.

Penduduk yang mendiami wilayah ini merupakan masyarakat multi-etnik yang memiliki latar belakang budaya, adat istiadat, dan agama yang berbeda. Kondisi ini diakibatkan oleh tingkat mobilitas penduduk yang tinggi, banyak kelompok etnik dari luar wilayah Poso yang berdatangan dan kemudian menetap. Interaksi sosial antar kelompok multi-etnik sudah berjalan cukup lama. Masyarakat dengan latar belakang etnik dan agama yang berbeda hidup berdampingan secara *equal* tanpa terdapat dominasi salah satu kelompok terhadap kelompok lain. Tetapi dasarnya arus pendatang mendorong pada tingginya tingkat penjualan/transaksi tanah dari penduduk asli kepada pendatang. Kemudian lambat laun membentuk pola pemukiman yang membagi pendatang dan penduduk asli, yaitu kebanyakan penduduk pendatang mendiami wilayah pesisir dan wilayah urban (kota kabupaten). Sementara yang dikatakan sebagai penduduk asli bergeser ke wilayah pegunungan. Juga digambarkan bahwa kebanyakan para pendatang bergerak di sektor perdagangan/niaga sedang penduduk asli di sektor pertanian (produsen). Pembagian ini sebetulnya tidak seluruhnya benar, tetapi sudah dijadikan ciri untuk membedakan penduduk asli dan pendatang. Karena kegiatan penduduk pendatang banyak di sektor jasa dan niaga, maka lokasi tinggal pun lebih mendekati dan atau di sekitar perkotaan yang memiliki semua akses kepada ekonomi dan politik/kekuasaan (pusat pemerintahan). Kondisi tersebut telah menciptakan suatu peluang konflik. Kesenjangan penguasaan terhadap sumberdaya (ekonomi, politik) di atas perbedaan etnik dan agama, merupakan potensi pemicu konflik di wilayah Poso.

Kehidupan ekonomi masyarakat umumnya masih bertumpu di sektor pertanian, selain sebagai sumber pangan juga menunjang sektor lain seperti industri, perdagangan dan jasa. Sedang untuk tanaman pangan masih bertumpu pada padi. Pada tahun 2000 produksi padi mengalami penurunan sebesar 44,46% atau 44.579 ton dibanding tahun 1999 dimana produksi padi mencapai 80.264 ton. Penurunan produksi padi ini dipengaruhi oleh kemarau panjang pada tahun 2000 sehingga produksi rata-rata hanya mencapai 32,89 kw/ha sedang pada tahun 1999 mencapai 33,76 kw/ha. Selain padi, tanaman pangan lain yang cukup menonjol adalah

jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedele dan kacang hijau serta sayuran seperti bawang daun, bawang merah, tomat, kentang, cabe. Di sektor perkebunan, komoditi yang menonjol adalah kopi, kakao, cengkeh, kelapa sawit dan karet yang rata-rata produksinya meningkat seiring dengan bertambahnya luasan lahan perkebunan. Demikian pula dengan perkebunan rakyat. Sedangkan di sektor kehutanan, wilayah ini dikenal sebagai penghasil eboni (kayu hitam).

Selain potensi yang dimiliki, letak wilayah ini berada pada posisi yang strategis sebagai pusat lalu lintas perdagangan yang menghubungkan ke lima propinsi di Sulawesi (Sugiyana 2001; Anonim 2002). Tetapi kondisi ini tidak dapat dipertahankan akibat terjadinya kerusuhan yang mengacaukan kehidupan sosial-ekonomi, hal ini dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 1997 yang mencapai angka rata-rata 5,15%, di tahun 1999 menurun akibat krisis hingga mencapai 2,12%. Seiring dengan meletusnya lagi kerusuhan di tahun 2000, pertumbuhan ekonomi menurun drastis hingga *minus* 4,78% (Sugiyana 2001).

Dengan kondisi seperti itu, Pemerintah Daerah berupaya keras memulihkan kembali roda ekonomi daerah sekaligus ekonomi rakyat. Salah satu yang penting adalah dengan menciptakan kondisi yang aman serta kondusif bagi perkembangan ekonomi. Untuk itu hingga kini aparat keamanan masih terus melakukan pengawasan di wilayah Poso agar tidak terjadi peristiwa yang dapat menghancurkan kehidupan sosial-ekonomi dan politik masyarakat Poso. Hal ini karena masih terdapat upaya-upaya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memicu konflik disamping masih terdapat kelompok masyarakat yang belum menerima akibat peristiwa yang telah terjadi dan masih menyimpan dendam. Celah-celah seperti ini yang kerap terpicu emosinya dalam berbagai peristiwa yang terjadi sehingga dapat kembali menyulut konflik. Tetapi sejauh ini kondisi keamanan masih dapat dikendalikan dengan sigapnya aparat keamanan dalam menanggapi segala peristiwa yang terjadi, terutama yang berbau SARA.

Kecamatan Poso Kota

Sebagai pusat kota dan perdagangan bagi wilayah kabupaten Poso, peluang pengembangan wilayah ini sangat besar. Tetapi tidak berarti tidak ada kendala. Sebagai pusat pemerintahan dan pusat kota, kendala yang utama dirasakan adalah tingkat persaingan yang tinggi, terutama dengan banyaknya masyarakat pendatang yang umumnya bergerak di sektor ekonomi/niaga sehingga membuka peluang persaingan yang ketat.

Sebagai salah satu wilayah eks kerusuhan, pemulihan ekonomi masyarakat menjadi signifikan. Beribu kota di Kota Poso, wilayah ini memiliki luas 60,46 Km² atau sekitar 0,42% dari luas wilayah kabupaten. Populasi mencapai 29.555 jiwa (12,74% dari populasi Kabupaten) atau 6.283 KK (Kepala Keluarga), terdiri atas perempuan sebanyak 14.583 jiwa dan laki-laki sebanyak 14.972 jiwa, kepadatan wilayah ini mencapai 488 jiwa/km². Dengan komposisi seperti itu, wilayah ini terbagi kedalam 15 kelurahan, dengan penduduk yang sangat heterogen, ditinggali kurang lebih empat kelompok etnik besar, yaitu Jawa, Bali, Bugis dan Gorontalo. Kelompok etnik dominan adalah Bugis dan Gorontalo. Komposisi penduduk berdasarkan agama yang dianut secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut: Islam sebanyak 24.149 jiwa (81,71%), Protestan sebanyak 2.302 jiwa (7,63%), Katolik 596 jiwa (2,12%), dan Hindu & Budha sebanyak 2.508 jiwa (8,49%)

Seperti juga daerah urban lain, kegiatan ekonomi utama di Kota Poso adalah di sektor informal atau niaga dan jasa. Sebagian kecil wilayah masih merupakan daerah pertanian dengan komoditi utama kakao, perikanan laut dan ternak (kambing dan ayam). Akibat kerusuhan, kerugian yang diderita wilayah ini cukup besar, terutama berkaitan dengan fasilitas umum yang telah menjadi puing-puing, seperti misalnya: hotel, pasar, pertokoan, serta BLK (Bengkel Latihan Kerja). Dengan kondisi

seperti ini kegiatan pengembangan tidak begitu optimum hasilnya. Hal ini menjadi pengalaman pada tahun 2003, dimana kegiatan pelatihan pembuatan berbagai peralatan TTG sedikit terhambat, karena keterbatasan ketersediaan bahan baku dan fasilitas perbengkelan. Dengan hancurnya BLK, tidak tersedia lagi fasilitas perbengkelan yang dapat dimanfaatkan bagi berbagai kegiatan pelatihan. Kendala ini dapat teratasi sementara melalui kerjasama dengan SMK Negeri 3 Poso, yang terletak di Kecamatan Poso Pesisir. Sebagai sarana pengajaran bagi para siswa sekolah ini dilengkapi dengan fasilitas perbengkelan yang cukup lengkap.

Kecamatan Poso Pesisir

Wilayah kecamatan Poso Pesisir sebagai wilayah fokus kedua juga merupakan wilayah eks kerusuhan. Faktor pertimbangan lokasi ini menjadi fokus kegiatan, selain sesuai dengan tema kegiatan, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat, juga sesuai dengan rencana pemerintah daerah dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat terutama di wilayah eks kerusuhan.

Kecamatan Poso Pesisir beribu kota di Mapane terletak 13 Km dari ibu kota kabupaten (Poso) terdiri atas 24 desa dan 2 kelurahan. Jumlah penduduk mencapai 21.649 jiwa (9,35% dari populasi kabupaten) dengan jumlah KK (kepala keluarga) 6.617, terdiri atas laki-laki 11.285 jiwa (52,13%) dan perempuan 10.409 jiwa (48,08%). Dengan wilayah seluas 1.623,92 Km² (11,25% dari luas total wilayah kabupaten Poso), kepadatan penduduk mencapai 13 jiwa/Km², mata pencaharian utama adalah petani dan nelayan². Masyarakat yang tinggal di wilayah Kecamatan Poso Pesisir ini terdiri dari beberapa kelompok etnik dan agama. Kelompok etnik yang mendiami wilayah ini antara lain Bali, Pamona dan Bugis dengan kelompok etnik dominan Pamona. Dari keyakinan yang dianut, wilayah ini dapat dikatakan

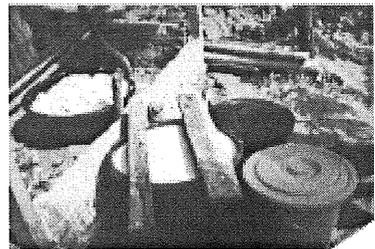
²⁾ Informasi informal via komunikasi telepon, sumber Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Poso.

seimbang antara Islam dan Kristen, dengan rincian: Islam sebanyak 46,59%, kemudian Protestan sebanyak 45,15%, Hindu & Budha sebanyak 7,86% dan Katolik sebanyak 0,30%.

Meskipun belum 100% penduduknya kembali, di tahun 2004 perekonomian wilayah ini mulai bangkit. Penduduk yang telah kembali, mulai membangun kembali rumah mereka dan membuka kebun. Lahan-lahan pertanian sudah mulai ditanami, dan penduduk sudah mulai menuai hasil panen mereka, terutama komoditi kakao. Hasil utama wilayah ini di sektor pertanian dan perkebunan (padi, kelapa dan kakao) serta perikanan laut. Rata-rata per KK memiliki kebun kakao seluas $\frac{1}{2}$ hektar dengan jumlah pohon sekitar 300 – 400 pohon. Secara keseluruhan, 25% wilayah ini ditanami kakao. Sedangkan kelapa lebih merupakan tanaman pekarangan dengan rata-rata KK memiliki 10 pohon, hasilnya dikeringkan menjadi kopra dan dijual ke pasar di Poso Kota bila harga baik. Bila harga kopra turun, masyarakat mengolahnya sendiri menjadi minyak goreng dengan teknologi sederhana dan masih dilakukan secara manual. Hanya dalam pamarutan mereka memanfaatkan mesin pamarut yang ada (2 unit) dengan sistem sewa. Potensi lain yang cukup menonjol adalah mangga (33 ton) dan pisang (13,35 ton). Di sektor perikanan wilayah ini menghasilkan 876,30 ton tahun 1998 dengan jumlah nelayan 316 KK (sekitar 5%).



a) Proses pemerasan
(memisahkan air dan ampas)



b) Tungku yang digunakan dalam
pembuatan minyak kelapa

Gbr. 1. Teknologi Tradisional Pembuatan Minyak Kelapa

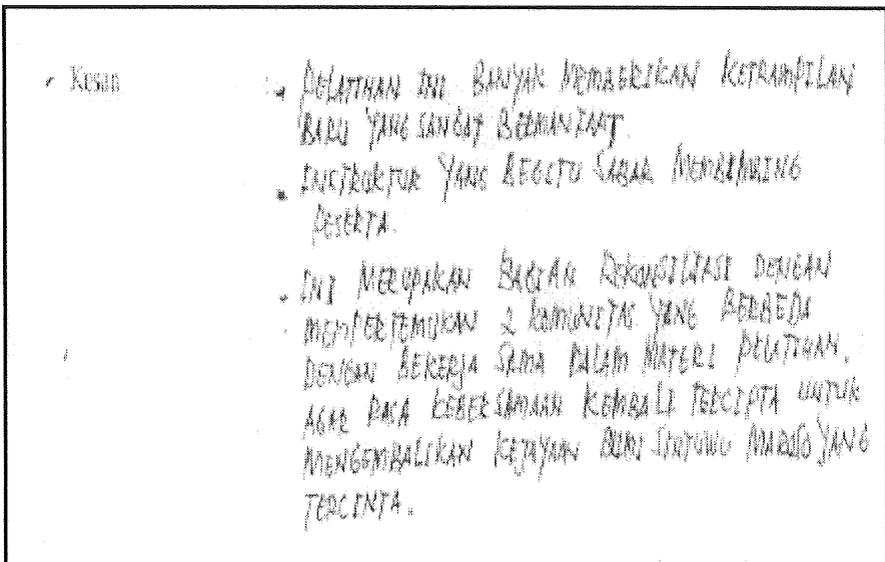
Peningkatan Keterampilan Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat Poso diarahkan pada peningkatan nilai tambah komoditas pertanian melalui pemanfaatan teknologi pengolahan lanjut. Peningkatan nilai tambah komoditi pertanian mendukung kegiatan industri sekaligus membuka peluang peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat dan daerah. Dengan mulai lancarnya transportasi dan jalur perhubungan, maka peluang pengembangan usaha berbasis agroindustri cukup menjanjikan.

Dalam kegiatan dengan tekanan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, alih teknologi sangat penting dan merupakan syarat agar suatu kegiatan berkelanjutan (*sustain*). Proses alih teknologi dapat dilakukan melalui berbagai cara antara lain diseminasi (penyebaran), pelatihan dan penyuluhan, serta pendidikan (formal). Dalam kegiatan ini peningkatan SDM dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan yang dipusatkan di Base Camp LIPI di Poso Kota dengan peserta berasal dari dua kecamatan (Poso Kota dan Poso Pesisir). Pelatihan diselenggarakan sebagai salah satu *metode proses alih teknologi* dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat (peserta) dan mendorong pada tumbuhnya atau berkembangnya usaha kecil dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Metode pelatihan disampaikan dengan komposisi 80% praktek dan 20% penyampaian teori yang membahas dan menjelaskan tentang prosedur kerja, proses, bahan-bahan yang digunakan terutama bahan penunjang beserta fungsinya.

Dalam pelaksanaan pelatihan, penentuan peserta berdasarkan usulan dari kelompok masyarakat, yang kemudian diseleksi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria peserta diterapkan untuk menjangkau calon peserta yang memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan usaha. Dari berbagai pengalaman pada berbagai kegiatan pelatihan, tanpa proses seleksi peserta yang berpartisipasi lebih banyak bersifat sekedar ingin tahu, atau lebih tertarik pada jumlah uang saku yang akan diterima bila mengikuti pelatihan. Pemberian uang saku dalam kegiatan pelatihan sudah menjadi hal yang lazim di berbagai daerah di Indonesia.

Pelaksanaan pelatihan yang menggabungkan dua komunitas berbeda agama, yang sebelumnya merupakan kelompok yang bertikai (konflik Poso), merupakan salah satu upaya menuju suatu kebersamaan. Agar efektif peserta dibagi secara berkelompok, pembagian kelompok dirancang dalam kelompok kecil yang beranggotakan 3 orang dan terdiri dari dua kelompok komunitas berbeda agama (Islam dan Kristen). Dengan kelompok kecil seperti itu maka dari para peserta dituntut kerjasama yang baik. Respon para peserta terhadap pendekatan ini sangat positif. Kerjasama dan persahabatan terjalin dengan baik antara para peserta, yang diwujudkan dengan saling kunjung atau bertukar informasi melalui telepon. Respon positif ini dapat dilihat dari salah satu komentar peserta di bawah ini:



Dapat berkumpul dan bekerja bersama dalam kegiatan pelatihan merupakan pengalaman yang sangat berkesan. Terutama mereka dapat bekerjasama, antara Islam dan Kristen. Hal ini ditunjukkan pula pada saat pelatihan. Pelatihan berjalan dengan baik dimungkinkan karena kerjasama yang baik antar peserta. Hal ini memerlukan pengertian dan kebersamaan sehingga tidak terasa ada jarak antar peserta dari kelompok agama yang berbeda.

Pelatihan juga dilakukan di lokasi atas permintaan masyarakat dan LSM lokal. Pelatihan dilakukan di Desa Labuan (Islam) dan Desa Silanca (Kristen) keduanya di Kecamatan Lage, pelatihan dilakukan secara terpisah antara dua komunitas dari agama yang berbeda. Tetapi karena komoditi yang dilatihkan berbeda, menimbulkan keinginan-tahuan para peserta, sehingga peserta dari dua desa tersebut saling berkunjung dan bertukar produk yang mereka hasilkan dalam pelatihan tersebut. Kunjungan ke masing-masing desa tersebut merupakan yang pertama semenjak pecah konflik Poso.

Pengembangan Usaha

Usai pelatihan dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kader yang telah dilatih untuk menyoroti kegiatan dan minat terhadap pengembangan usaha kecil. Dari evaluasi ini kemudian para peserta didorong untuk membentuk kelompok usaha kecil yang memproduksi berbagai produk yang telah dilatihkan. Kelompok usaha kecil rumah tangga yang terbentuk berjumlah 4 kelompok, dari 20 peserta pelatihan pengolahan pangan, yaitu:

1. Kelompok usaha kecil di Kelurahan Kayamanya, terdiri atas dua orang kader, mengkhhususkan diri pada olahan pangan berbasis pisang.
2. Kelompok usaha kecil di Kelurahan Gebangrejo, terdiri atas dua orang kader, mengkhhususkan diri pada olahan berbasis jagung pulut.
3. Kelompok usaha kecil di Kelurahan Lawanga, terdiri atas tiga orang kader, mengkhhususkan diri pada olahan berbasis ikan dan cabe.
4. Kelompok usaha kecil di Kelurahan Kawua, terdiri atas empat orang kader, mengkhhususkan diri pada olahan berbasis pisang dan sambiki (labu kuning).

Pendampingan yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok usaha tersebut selain terhadap masalah teknik pengolahan juga dalam penghitungan harga jual produk. Teknik pengolahan meski sudah dilatihkan, tetapi pada saat praktek bimbingan terhadap para kader tersebut masih diperlukan, terutama pada penentuan kematangan produk olahan serta kemasan. Untuk masalah kebersihan dan kesehatan makanan yang dihasilkan dilakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Poso, khususnya bidang pengawasan pangan, sekaligus pembinaan bagi pengusaha kecil untuk dapat memperoleh nomor ijin dari Dinas Kesehatan (No. PIRT).

Usaha yang baru tumbuh tersebut masih membutuhkan pendampingan untuk dapat menjadi usaha yang mandiri dan produktif. Karena masih baru, pasar untuk produk-produk kelompok usaha ini belum terbentuk, dan masih bergantung pada pesanan. Pendampingan yang diberikan kepada kelompok-kelompok usaha ini selain bantuan peralatan (dari PMK Poso) juga dalam pemasaran. Pemasaran dalam konteks ini adalah dukungan melalui kegiatan pameran dan berbagai bentuk promosi. Untuk bahan baku, kecuali ikan, tidak merupakan masalah karena kebanyakan mereka peroleh dari kebun sendiri. Sementara ikan tersedia musiman, sehingga sering menjadi masalah ketika pesanan tinggi sedang bahan baku kurang. Karena kontinuitas produksi merupakan kunci dalam kegiatan usaha.

Pendampingan terhadap unit usaha yang terbentuk masih tetap dibutuhkan terutama di sektor pemasaran. Dengan keterbatasan yang ada di lokasi, masih diperlukan usaha yang keras untuk dapat meningkatkan produktivitas kelompok-kelompok usaha tersebut. Kontinuitas, kualitas dan kemasan menjadi garapan yang perlu dilakukan secara cermat agar produk yang dihasilkan memiliki daya saing. Dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menumbuhkan semangat kelompok usaha kecil tersebut dalam upayanya meningkatkan produk.

Selain mendorong pertumbuhan usaha kecil berbasis agro, dalam kegiatan pemberdayaan ini juga dipromosikan pengembangan usaha pengolahan kakao. Tetapi untuk pengolahan kakao tidak dapat dilakukan dalam skala rumah tangga,

karena peralatan yang dibutuhkan cukup mahal juga membutuhkan ruang yang cukup luas. Dengan potensi kakao yang besar, pemerintah bermaksud untuk mengembangkan usaha olahan kakao sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditi kakao yang selama ini hanya dijual dalam bentuk produk primer (biji kakao kering). Oleh karena itu untuk pengembangan usaha olahan kakao, pemerintah daerah menyediakan lahan dan bangunan untuk dijadikan unit usaha olahan kakao. Berbagai upaya telah dilakukan termasuk menyiapkan pasar bagi produk olahan kakao nantinya. Meskipun belum berproduksi dan baru pada tahap percontohan, penyiapan pasar sangat penting sehingga ketika unit usaha ini berproduksi minimal pasar sudah mengenalnya. Untuk menuju pada produksi, beberapa upaya dan perbaikan dari sisi teknologi masih harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk. Diperkirakan agar usaha baru ini berproduksi secara kontinyu masih memerlukan waktu kurang lebih 2 – 3 tahun. Dukungan masih diperlukan agar usaha ini dapat berproduksi seperti yang diharapkan. Masyarakat sangat berharap terhadap kegiatan usaha ini, karena dapat memberikan kesempatan kerja lain selain di sektor pertanian. Juga masyarakat sangat mengharap mereka dapat menghasilkan suatu produk unggulan dari hasil pertanian mereka. Dengan berkembangnya usaha ini, termasuk juga usaha kecil olahan pangan, masyarakat berharap tidak akan lagi terjadi pertikaian diantara mereka, sebaliknya adalah kembalinya kebersamaan yang pernah terjalin sebelumnya.

Kendala dan Pemecahannya

Kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di Poso adalah kondisi sosial-politik yang masih belum menentu. Secara keseluruhan kondisi di Poso telah aman, tetapi sewaktu-waktu masih sering terjadi peristiwa-peristiwa yang berpeluang memicu terulangnya konflik seperti pada tahun 1998/2000. Bila hingga saat ini keadaan masih terkendali, hal itu karena kesiapan aparat keamanan yang tanggap dan cepat menangani peristiwa yang terjadi sekecil apapun. Tetapi

masalahnya adalah masyarakat lebih sering dan cepat terpengaruh oleh peristiwa yang terjadi. Bila terjadi suatu peristiwa yang melibatkan dua orang atau lebih yang berbeda agama (Islam dan Kristen), maka kota Poso pun menjadi sepi karena masyarakat tidak berani keluar rumah atau lingkungan mereka. Hal ini sering menjadi hambatan bagi pelaksanaan suatu kegiatan. Tetapi dengan kondisi yang ada, kegiatan tetap harus dilaksanakan. Berbagai penyesuaian atau negosiasi dan kompromi dilakukan agar kegiatan berjalan lancar tetapi juga keamanan terjamin.

Kendala lain yang cukup signifikan adalah keterbatasan peralatan dan bahan pendukung bagi pengembangan usaha kecil pengolahan pangan dan kakao. Keterbatasan ini berakibat pada tingginya biaya produksi, sehingga produk-produk usaha kecil kurang dapat bersaing. Bila kondisi ini berlangsung terus, tentu akan mempengaruhi usaha karena sulitnya pemasaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, intervensi pemerintah daerah masih sangat diperlukan, melalui subsidi misalnya. Yang telah dilakukan menanggapi kondisi ini adalah pemerintah daerah menyediakan kemasan dan bahan pendukung yang diperlukan melalui kegiatan kerjasama dengan harga yang relatif terjangkau dan bersaing.

Untuk pengembangan produk olahan kakao, kurangnya ketersediaan bahan baku kakao yang berkualitas menjadi kendala yang berpengaruh pada kualitas produk. Karena umumnya biji kakao yang ada di pasar tidak melalui proses fermentasi. Sosialisasi fermentasi kakao belum mendapat respon dari masyarakat, karena yang menjadi kendala adalah waktu fermentasi yang cukup lama (7 hari). Waktu pula yang menyebabkan petani enggan melakukan fermentasi terhadap produk kakao mereka. Upaya memperpendek waktu fermentasi menjadi dua hari dengan bantuan starter belum memberikan hasil. Karena meski waktu dapat diperpendek, tetapi rasa tak bisa diperbaiki, dalam arti pembentukan cita rasa kakao tidak terjadi dengan sempurna.

Kesimpulan

Kegiatan intervensi seperti pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, mendapat respon positif dari masyarakat karena keterlibatan mereka dalam kegiatan tersebut, disamping manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Berbagai kendala dihadapi, terutama pada rendahnya aksesibilitas dan fasilitas pendukung, seperti misalnya peralatan, kemasan dan bahan pendukung yang dibutuhkan, tetapi dengan dukungan pemerintah daerah kegiatan tetap dapat berjalan dengan baik.

Kegiatan yang mendorong pada optimasi sumber daya bagi pengembangan kegiatan produktif memberikan berbagai pilihan kepada masyarakat dalam meningkatkan ekonomi mereka. Meskipun manfaat kegiatan baru dirasakan pada kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan, dan jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi gaung dari kegiatan ini telah menarik minat berbagai kelompok masyarakat yang lain. Dengan dukungan pemerintah, kegiatan serupa ini dapat lebih ditingkatkan sehingga gaungnya akan dapat dirasakan oleh lebih banyak kelompok masyarakat.

Selain potensi sumber daya alam yang ada, di dalam masyarakat terdapat sumber daya sosial budaya. Sumber daya-sumber daya tersebut jika digali dan dijadikan modal dalam kegiatan pembangunan, berubah menjadi energi yang sangat besar untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi. Keanekaragaman sistem budaya, perbedaan latar belakang etnis dan agama merupakan potensi dan modal bagi kegiatan pembangunan. Di satu sisi potensi tersebut rentan terhadap konflik terbuka, di sisi lain merupakan kekayaan yang dapat mempercepat proses perkembangan daerah karena di dalamnya bisa terjalin hubungan kerjasama dan proses pertukaran ilmu pengetahuan yang berakar pada sistem sosial budaya masing-masing. Untuk dapat lebih menumbuhkan perkembangan daerah dalam wacana

pemberdayaan ini, sudah seharusnya jika energi positif dari keanekaragaman ini dapat lebih digali dan dimanfaatkan.

Untuk lebih mengoptimalkan hasil-hasil yang telah diperoleh dalam kegiatan ini, dukungan kelembagaan sangat diperlukan, kelembagaan baik formal maupun informal. Melalui kelembagaan, kegiatan yang telah dikembangkan akan lebih memiliki landasan untuk peningkatan lebih lanjut. Karena melalui dukungan kelembagaan, baik formal (dukungan kebijakan) maupun informal (berakar dari masyarakat) suatu kegiatan dapat lebih mudah diterima masyarakat, dan mendapat kepercayaan masyarakat. Dengan dukungan kelembagaan, keberlanjutan kegiatan dapat lebih terjamin.

Catatan

BEBERAPA PERISTIWA SOSIAL-POLITIK PADA BULAN JULI – SEPTEMBER 2004 DI POSO

Kondisi sosial-politik lokasi ketika tim pelaksana lapangan LIPI melaksanakan kegiatan implementasi pada bulan Juli sempat memanas. Kondisi ini dipicu oleh terjadinya berbagai peristiwa yang membuka peluang timbulnya konflik dengan latar belakang SARA. Meskipun masyarakat Poso sendiri sudah menyadari bahwa konflik tidak memberikan keuntungan bahkan lebih banyak merugikan, tetapi tetap saja rasa takut masih mengendap di hati mereka. Sesungguhnya masyarakat Poso sudah menginginkan kehidupan yang normal kembali dan berharap tidak lagi terjadi kerusuhan, hal ini ditampakkan dengan makin banyak dan giatnya mereka membuka dan mengolah lahan yang lama ditinggalkan. Juga kegiatan ekonomi sehari-hari mulai ramai, dan pusat perekonomian mulai padat oleh pedagang dan pembeli.

Kondisi tersebut sedikit terganggu dengan berbagai peristiwa yang terjadi, dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi kegiatan LIPI di Poso. Hal ini terutama karena dalam pelaksanaan kegiatan selalu melibatkan masyarakat dari kelompok agama yang berbeda dalam satu kegiatan bersama. Beberapa catatan peristiwa selama bulan Juli hingga bulan September 2004:

1. Tanggal 14 Juli 2004:

Terjadi percobaan pembakaran rumah salah satu warga di Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir, tetapi berhasil dihentikan.

2. Tanggal 15 Juli 2004:

Terjadi pembunuhan supir ojek (Islam) di Desa Pandiri (Kristen) oleh penumpangnya (Kristen) sebetulnya hanya peristiwa perampokan (sudah tertangkap).

3. Tanggal 16 Juli 2004:

Karena beredar isue yang mengkaitkan konflik Islam – Kristen pada peristiwa pembunuhan tanggal 15 Juli, maka terjadi peristiwa penikaman terhadap seorang Ibu (Kristen) di Kelurahan Kawua, Kecamatan Poso Kota oleh dua orang pemuda (Islam) sebagai tindak balasan peristiwa tersebut. Satu orang pelaku telah tertangkap, satu lagi masih buron, dan Poso dalam kondisi siaga 1.

4. Tanggal 17 Juli 2004:

Bom meledak di Gelanggang Olah Raga, dimana sedang berlangsung festival musik sebagai salah satu upaya rekonsiliasi. Dalam peristiwa ini tidak ada korban.

5. Tanggal 22 Juli 2004:

Tersiar berita terjadinya pembakaran di salah satu kampung di desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir. Berita ini menyebabkan seluruh pegawai dipulangkan, demikian pula anggota DPRD yang sedang melaksanakan sidang, dihentikan dan dianjurkan untuk pulang. Pada saat yang sama di Base Camp LIPI sedang berlangsung pelatihan pengolahan pangan hari terakhir. Panitia dari Dinas PMK bergegas menuju Base Camp untuk menjaga jangan sampai terjadi sesuatu dan peserta menjadi panik. Tetapi karena sibuk dalam kegiatan pelatihan, para peserta tidak mendengar kabar pembakaran tersebut. Kabar tersebut disampaikan

kepada koordinator kegiatan, baik dari LIPI maupun PMK yang berada di Base Camp mengawasi jalannya pelatihan. Setelah berunding maka diputuskan untuk tidak menyampaikan kepada peserta agar tidak menjadi panik, tetapi disiapkan kendaraan untuk mengantar ke alamat peserta bila keadaan memburuk. Tetapi ternyata berita merupakan peringatan yang salah (*false alarm*), yang sebenarnya terjadi adalah masyarakat membuka kebun dengan membakar rerumputan dan pepohonan, berita kemudian diralat.

6. Tanggal 23 Juli 2004:

Terjadi peristiwa penembakan terhadap seorang warga di desa Betania (Kristen) di Kecamatan Poso Pesisir, korban terluka dan berhasil menyelamatkan diri. Hingga akhir kegiatan pelaku belum diketahui.

7. Tanggal 24 Juli 2004:

Penembakan terhadap Pendeta Susi Tinele di Gereja Efrata Palu.

8. Tanggal 25 Juli 2004:

Penembakan terhadap supir mobil boks di perbatasan Poso – Parigi oleh 6 orang tak dikenal dengan mengendarai sepeda motor.

9. Tanggal 23 Agustus 2004:

Sebuah bom meledak di jalan Morotai, Poso Kota (lokasi tidak terlalu jauh dengan Base Camp LIPI) pada jam 21:00 WITA.

Hingga kini, sebagian besar masyarakat komunitas Kristen bila sakit belum berani berobat ke Rumah Sakit Umum Poso karena berada di wilayah komunitas Islam. Masyarakat Kristen biasanya berobat ke Rumah Sakit Tentena yang merupakan

wilayah komunitas Kristen. Terkecuali pegawai (dari komunitas Kristen) yang sudah merasa aman berobat ke Rumah Sakit Umum Poso. Alasan mereka tidak berani berobat ke RSUD Poso, terutama sekali bila harus rawat inap, karena masih merasa takut bila terjadi suatu peristiwa mereka terjebak di Rumah Sakit atau di wilayah komunitas Islam dan tidak dapat keluar dari wilayah Islam sehingga keselamatannya pun kurang terjamin.

PENUTUP

Lidya Ariesusanty & Savitri Dyah W.I.K.R.

Kondisi sosial-politik yang masih belum menentu menjadi kendala dalam kegiatan pembangunan dan upaya pemulihan ekonomi di Kabupaten Poso pasca konflik. Selain itu kondisi psikologis masyarakat pasca konflik pun menjadi salah satu permasalahan yang sangat berpengaruh pada pencapaian pemulihan ekonomi di daerah tersebut. Permasalahan di Poso yang muncul ke permukaan, seperti yang diberitakan di media-media massa, adalah permasalahan agama dan suku. Tetapi jika ditelusur dari akar permasalahannya tampaknya bukanlah semata-mata masalah agama dan suku, banyak kepentingan yang terlibat disini dan masyarakat setempatlah yang menjadi korban.

Permasalahan di Poso pasca konflik secara psikologis adalah trauma yang tertanam pada masyarakat dan tidak adanya rasa aman. Penanganan psikologis sangat diperlukan untuk mengembalikan perasaan-perasaan aman ini. Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh tim psikologi UNPAD Bandung pada guru dan siswa SMP-SMA di Poso, tampak bahwa nilai untuk depresi berat sangat tinggi (53%). Karena itu perlu penanganan atau perlakuan khusus pada permasalahan psikologi dari masyarakat "korban" konflik ini. Selain penanganan khusus dari para psikolog profesional, penanganan pada kelompok masyarakat dengan tingkat depresi menengah ke bawah dapat dilakukan oleh tenaga pendamping yang sedikitnya telah dibekali dasar-dasar pengetahuan psikologi.

Menumbuhkan kembali rasa aman pada masyarakat merupakan tantangan bagi kita semua, karena harus dibangun diatas puing-puing konflik yang menyisakan derita. Proses pembangunan kembali rasa aman dan percaya di masyarakat membutuhkan proses yang sangat panjang, karena bukan semata-mata melakukan

kelompok diskusi, tetapi lebih pada bagaimana memperkuat ikatan dan kebersamaan antar masyarakat yang dulu pernah terjalini.

Untuk bersama-sama memecahkan permasalahan ini, kelembagaan sangatlah berperan, baik kelembagaan formal maupun informal, bahkan kelembagaan terkecil seperti perkumpulan arisan, pengajian atau ibadah misalnya. Kelembagaan terkecil yang timbul dari masyarakat umumnya merupakan suatu kekuatan tersendiri yang tidak mudah tergoyahkan. Tetapi perlu diingat, meski kecil pada awalnya, kelembagaan seperti ini dapat juga menjadi besar dan kuat. Hal yang perlu diperhatikan bila hal tersebut terjadi adalah jangan sampai perkembangan yang terjadi mengganggu kelembagaan yang sudah ada sehingga membuka peluang konflik baru. Kelembagaan informal yang didorong pertumbuhannya dari masyarakat sendiri inilah yang dicoba untuk dikembangkan melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini tampak pada kegiatan pelatihan yang menggabungkan dua kelompok yang pernah berseteru (Islam dan Nasrani) dalam suatu pelatihan pengolahan pangan dan kakao. Kegiatan semacam ini diharapkan dapat menjadi mediator yang bersifat netral untuk mulai mempersatukan kembali kelompok-kelompok masyarakat yang pernah bertikai.

Meskipun bukan satu-satunya cara, tapi kegiatan ekonomi tersebut dapat menjadi ajang interaksi sosial dari kelompok-kelompok masyarakat dengan latar belakang yang berbeda: etnik, kultur dan agama. Kegiatan demikian bertujuan untuk menunjukkan pada masyarakat bahwa mereka memiliki kepentingan bersama, yaitu untuk mencapai kesejahteraan. Konsep ini memang sangat sederhana, mengingat permasalahannya yang cukup kompleks. Tetapi patut dicoba karena respon masyarakat Poso cukup baik dan memberikan harapan akan terwujudnya kebersamaan di antara mereka.

Mempertimbangkan hal tersebut, maka pendekatan ekonomi masih perlu didukung dengan pendekatan psikologis untuk dapat mengurangi masalah yang belum terselesaikan secara tuntas. Salah satu masalah yang akan sulit dihilangkan

adalah rasa dendam yang disinyalir dapat diturunkan dari generasi ke generasi. Solusi yang mungkin dapat dilaksanakan adalah dengan membentuk suatu forum yang mempertemukan kedua kelompok yang pernah bertikai. Dalam forum tersebut dilakukan satu sesi untuk mengeluarkan emosi dan seluruh perasaan yang muncul akibat konflik di hadapan masing-masing kelompok yang pernah bertikai. Langkah selanjutnya adalah dengan mencoba menimbulkan romatisme-romantisme masa lalu, yaitu saat keadaan masih tenang dan damai. Strategi ini dapat digunakan untuk melepaskan semua dendam dan rasa curiga yang selama ini terpendam dalam hati sebagai bom yang suatu waktu dapat meletus menjadi konflik terbuka. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah memetakan masyarakat Poso dan kondisinya. Dari pemetaan ini dapat diidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan dan mudah terpicu dalam konflik, baik berdasarkan usia, golongan ekonomi, sosial dan kriteria lainnya.

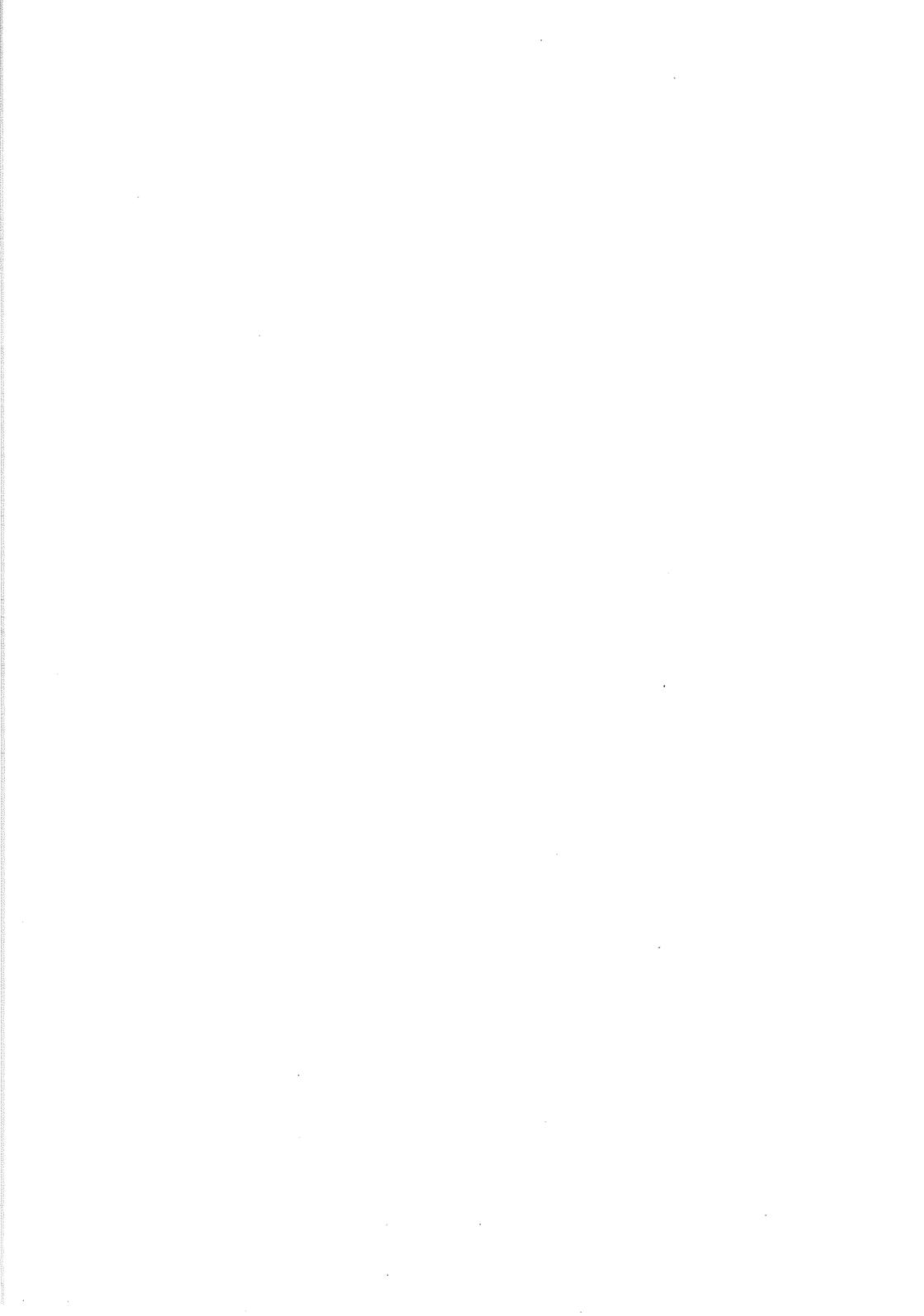
Mempertimbangkan kondisi dan permasalahan masyarakat Poso, maka bentuk kelembagaan yang dibutuhkan masyarakat pada pasca konflik ini adalah kelembagaan yang bersifat kekerabatan dan terbuka, seperti pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan kelembagaan sederhana yang terlihat tak beraturan namun sesungguhnya merupakan suatu kelembagaan yang sangat terstruktur dan jelas. Di dalam pasar tidak hanya *interest* yang ada, tetapi juga terdapat aspek moral. Walaupun demikian, untuk tujuan pemulihan perekonomian masyarakat, tidak bisa sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar, karena bila hal itu terjadi, dari berbagai studi dan pengalaman, menunjukkan petanilah yang akan lebih banyak dirugikan. Meskipun petani merasa lebih nyaman dengan bentuk pasar tradisional ini daripada bentuk kelembagaan lain yang lebih *strick* atau kaku seperti koperasi. Sebagai contoh adalah tengkulak yang selama ini kita anggap sebagai pihak yang merugikan petani. Namun sebenarnya peran tengkulak sangat besar dalam membantu petani karena meniadakan kerumitan-kerumitan lembaga formal yang menjadi kendala bagi petani untuk memecahkan permasalahan ekonomi mereka.

Tetapi yang perlu diwaspadai adalah ketika terjadi monopoli oleh para tengkulak. Bila hal ini terjadi, kerugian terbesar akan dialami petani.

Permasalahan lain yang perlu ditinjau adalah “ketahanan pangan” masyarakat Poso pasca konflik. Tujuan ketahanan pangan ini adalah tersedianya pangan, tercukupinya kebutuhan gizi serta kesejahteraan. Pasca konflik, ketahanan pangan menjadi rentan pada masyarakat Poso, karena sumber pangan mereka banyak yang telah hancur. Sehingga untuk memperoleh pangan yang dibutuhkan tidak dapat diperoleh dari lahan yang dimiliki. Sementara masyarakat bertahan hidup dengan adanya “Jaminan Hidup” dari pemerintah. Tetapi kondisi ini tidak dapat dipertahankan terus menerus, masyarakat sudah saatnya harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tidak lagi tergantung kepada bantuan pemerintah. Dalam hal ini sebagian besar masyarakat Poso masih dapat bertahan dari penghasilan penjualan kakao. Kakao merupakan tanaman primadona di wilayah Poso, dan pada saat pecah konflik tanaman kakao tidak ikut musnah bersama sumberdaya lainnya, bahkan masih memproduksi meskipun tidak optimal. Oleh karena itu kakao bisa menjadi basis peningkatan ketahanan pangan masyarakat dengan didukung sektor-sektor lainnya. Untuk itu kelembagaan diperlukan untuk mempertahankan kondisi yang ada dan meningkatkannya dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat. Untuk menentukan strategi dalam pengembangan kelembagaan yang dapat menjamin ketahanan pangan di Poso, perlu dipahami terlebih dahulu bagaimana pola *social security* yang ada. Dalam kasus Poso, *social security* diwujudkan pada kuatnya ikatan-ikatan kesukuan dalam aktivitas ekonomi.

Solusi yang sangat diharapkan dapat membantu dalam memulihkan kondisi di Poso pasca konflik adalah hubungan atau interaksi sosial dan kekerabatan, maka yang sebaiknya dibangun adalah kelembagaan dalam bentuk informal yang tumbuh dari masyarakat, yang perlu diingat disini adalah bahwa kelembagaan itu tidak harus berbentuk lembaga (wadah) tetapi lebih pada jaringannya (*networking*). Jaringan yang dibangun sesuai kebutuhan, yang mekanismenya dapat mencontoh

mekanisme pasar. Mengapa mekanisme pasar? jika dikaji lebih dalam, maka jaringan pasar dimanapun dan dalam kondisi apapun tetap dapat berjalan. Selain itu, karena kegiatan pemberdayaan ekonomi ini adalah sebagai *entry point*, maka hasil yang baik merupakan tuntutan. Demi konteks Poso pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan unit produksi pengolahan kakao akan membuka peluang terciptanya kelompok-kelompok atau komunitas yang saling berhubungan terpusat pada unit produksi tersebut. Beberapa komunitas yang mungkin terbentuk adalah petani kakao, penampung biji kakao, kelompok penyeleksi biji kakao, distributor, industri rumah tangga olahan kakao, dan pasar. Dari komunitas tersebut diharapkan akan terbentuk rantai atau jaringan yang bersinergi untuk mencapai kesejahteraan dan kebersamaan.



DAFTAR PUSTAKA

Anonim (2002): *Sintuwu Maroso Menjiwai Kedamaian di Poso*. Info-RI, Portal Informasi Nasional. www.info-ri.com/read_news.

Anonim (2002): Kabupaten Poso Dalam Angka 2001.

Anonim (...): **Feeding Minds Fighting Hunger: A World without Hunger**. www.feedingminds.org (diakses tanggal 31 Mei 2005).

Aziz, Nasru Alam (2001): *Mengembalikan Citra Poso*. **Kompas Cyber Media**, Selasa, 18 September 2001. www.kompas.com/kompas-cetak/0109/18/nasional/meng08.htm

Bauwens, Werner and Reyckler, Luc eds. (2000): **The Art of Conflict Prevention**. Brassey's. BPC Wheatons Ltd. Exeter.

BPS Kabupaten Poso (2001): **Kabupaten Poso Dalam Angka 2000**. BAPPEDA Kabupaten Poso dan BPS Kabupaten Poso.

Bronkhorst, Daan (1995): **Truth and Reconciliation Obstacles and Opportunities for human Rights**. Amnesty International, Amsterdam

Carolina; Abbas, A; Dyah, Savitri & Brojonegoro, Arjuno (1995): *Pengembangan Masyarakat Melalui Intervensi Teknologi: Kasus Pengembangan Masyarakat Pedesaan Wamena, Irian Jaya*. Makalah disampaikan pada **Seminar Pembangunan Untuk Irian Jaya**, Abepura, Desember 1995.

- Christenson, James A. & Robinson Jr., Jerry W. Ed. (1989): **Community Development in Perspective**. Iowa State University Press/Ames, Iowa-USA.
- Cohen, Abner (1969): **Customs and Politics in Urban Africa: A Study of Hausa Migrants in Yoruba Towns**. University of California Press, Berkeley, USA.
- Coser (1976): *The Functions of Social Conflict*, hal. 181-184 dalam Coser, Lewis A. & Rosenberg, Bernard ed.: **Sociological Theory**, Fourth edition. Collier Macmillan Publisher, London.
- Diamond, Louise (2001): **The Peace Book. 108. Simple Ways to Create a More Peace World**. Conari Press. Berkley, California.
- ESCAP (1984): **Technology for Development**. United Nations, Tokyo - Japan.
- Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran (2004): **Pembinaan Pendidikan Khusus Trauma Konseling. Daerah Ambon, Halmahera Utara, dan Poso**. Universitas Padjadjaran, Bandung.
- FAO (1983): *World Food Security: a Reappraisal of the Concepts and Approaches*. Director General's Report. Rome.
- FAO (1996): **Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action**. World Food Summit 13-17 November 1996. Rome.
- FAO (2003): **Trade Reform and Food Security: Conceptualizing the Linkages**. FAO, Roma.
- Firth, Raymond (1963): **Elements of Social Organization**. Boston, USA.
- Geertz, Clifford (1963): **Peddlers and Princess: Social Change and Economic Modernization in Two Indonesian Towns**. University of Chicago, Chicago, USA.

-
- Gittler, Joseph B. (1952): **Social Dynamics: Principles and Cases in Introductory Sociology**. McGraw-Hill International editions, New York, USA.
- Haque, Wahidul et.al (1977): *Towards a Theory of Rural Development*, pp. 11-20 dalam **Development Dialogue**, Vol. 2. A Journal of International Development Cooperation, published by The Dag Hammarskjöld Foundation, Uppsala, Swedia.
- Harper, Charles L. (1989): **Exploring Social Change**. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, USA.
- Herman, Judith Lewis (2001): **Trauma and Recovery, From Dmestic Abuse to Political Terror**. Pandora, London.
- Hikmat, Harry (2001): **Strategi Pemberdayaan Masyarakat**. Humaniora Utama Press, Bandung.
- Jedlicka, Allen D (1977): **Organization for Rural Development: Risk Taking and Appropriate Technology**. Praeger Special Studies, New York, USA.
- Koch, Klaus-Friedrich (1974): **War and Peace in Jalémó: The Management of Conflict in Highland New Guinea**. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, USA.
- Koentjaraningrat (1974): **Beberapa Pokok Antropologi Sosial**. Penerbit Dian Rakyat, Jakarta.
- Koentjaraningrat (1997): **Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan**. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lacey, Hoda (2000): **How to resolve Conflict in the Workplace**. Gower Publishing, Hampshire.

Lenski, Gerhard & Lenski, Jean (1987): **Human Societies: An introduction to Macrosociology**. Fifth Edition, McGraw-Hill International Edition, New York, USA.

Long, M. (1968): *Interest Rates and The Structure of Agricultural Credit Markets*. Oxford Economic Papers, Vol. 20.

Napoleoni, Loretta (2004): **Terror Inc. Tracing The money Behind Global Terrorism**. Penguin, London.

Nicholson, Norman (1988): *The State of The Art*, Chapter 1, pp. 3-39 dalam Ostrom, Vincent; Feeny, David and Picht, Hartmut ed.: **Rethinking Institutional Analysis and Development: Issues, Alternatives, and Choices**. International Center for Economic Growth, California, USA.

Parkin, D. (1972): **Palms, Wine and Witnesses: Public Spirit and Private Gain in An African Farming Community**. Intertext Books, London.

Patton, Michael Quinn (1990): **Qualitative Evaluation and Research Methods**, Second Edition. Sage Publications, Newbury Park, California.

Pruitt, dean G. & Rubin, Jeffrey Z. (2004): **Teori Konflik Sosial**. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Rogers, Everett M. (1983): **Diffusion of Innovation**, Third Edition. The Free Press, Collier Macmillan Publishers, New York, USA.

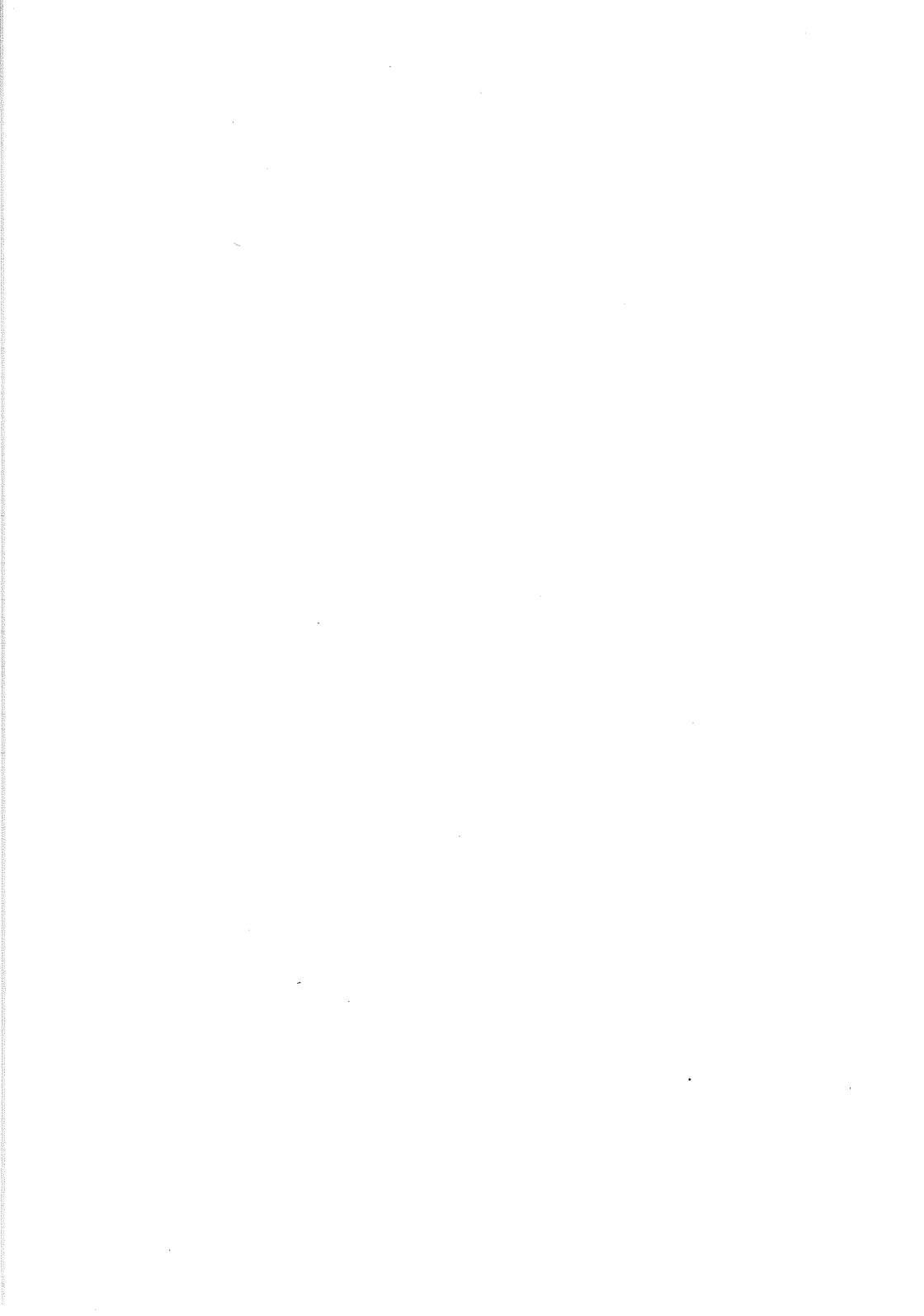
Rupesinghe, Kumar (1998): **Civil Wars, Civil Peace. An Introduction to Conflict Resolution**. Pluto Press, London.

Ruttan, Vernon (1978): **Induced Innovation: Technology, Intitutions, and Development**. The John Hopkins University Press, Baltimore & London.

-
- Saliem, Handewi P. dkk. (2004): **Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Kineja Ketahanan Pangan Nasional**. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Scott, James (1981): **Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara**. LP3ES, Jakarta.
- Soemardjan, Selo dan Soemardi, Soelaeman (1964): **Setangkai Bunga Sosiologi** (Kumpulan Tulisan).. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soetrisno, Loekman (1995): **Menuju Masyarakat Partisipatif**. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Spradley, James P. (1980): **Participant Observation**. Holt, Rinehart & Winston, New York, USA.
- Sugiya, Aritasius (2001): *Kabupaten Poso*. **Kompas Cyber Media**, Selasa, 18 September 2001. www.kompas.com/kompas-cetak/0109/18/NASIONAL/kabu08.htm.
- Parsudi, Suparlan (1999): *Kemajemukan, Hipotesis Kebudayaan Dominan dan Kesukubangsaan*, dalam **Jurnal Antropologi Indonesia** Vol. XXIII, No. 58, January – April 1999.
- Suryana, Achmad (2003): *Kinerja Ketahanan Pangan 2002 dan Prospek 2003*, dalam **Suara Pembaruan Daily**. www.polarhome.com (diakses tanggal 31 Mei 2005).
- Susanto, Hari (2004): *Konflik Poso, Tak Kunjung Sudah* dalam **Kompas**, 18 November 2004 (<http://www.lipi.go.id/www/www.cgi?baca&1100757751>).

- Syahyuti (2002): *Pembentukan Struktur Agraria pada Masyarakat Pinggiran Hutan: Kasus di Sekitar Wilayah Taman Nasional Lore Lindu di Kec. Palolo Kab Donggala*. Tesis Pasca Sarjana di IPB, Bogor.
- Syahyuti (2003): **Bedah Konsep Kelembagaan: Strategi Pengembangan dan Penerapannya dalam Penelitian Pertanian**. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Szanton, David (1963): *Art in Sulu: A Survey*. Philippine Studies, Vol. 11.
- Temple, G.P. (1976): *Mundurinya Involusi Pertanian: Migrasi, Kerja dan Pembagian Pendapatan di Pedesaan Jawa*, dalam Majalah **Prisma** No. 3 April 1976. LP3ES, Jakarta.
- United Nations (2003): *Report of the World Food Conference, Rome 5-16 November 1974 New York*, dalam FAO: **Trade Reform and Food Security: Conceptualizing the Linkages**. FAO, Roma.
- Uphoff, Norman (1986): **Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook With Cases**. Kumarian Press, USA.
- Woolcock, M (1998): *Social Capital and Economic Development: Toward A Theoretical Synthesis and Policy Framework*, pp. 151-208 dalam **Theory and Society**, Vol. 27 No. 2.
- World Bank (1998): *The Initiative on Defining, monitoring and Measuring Social Capital: Text of Proposal Approved for Funding*, dalam **Social Capital Initiative Working Paper No. 2**. The World Bank, Social Development Family, Environmentally and Socially Sustainable Development Network. June 1998. (<http://www1.worldbank.org/prem/poverty/scapital/wkrprr/sciwp2.pdf>. 9 Mei 2005).

Zulham, Armen dkk. (1998): *Peranan Industri Pengolahan dan Pengawetan Makanan dalam Perekonomian Nasional*, hal. 119-149 dalam Pasolon, Julius B. dkk.: **Prosiding Lokakarya Program dan Kajian Teknologi dalam Mendukung Pembangunan Pertanian di Sulawesi Tenggara**, Kendari 3-4 Nopember 1998. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kendari.



TENTANG PENULIS

Akmadi Abbas, Ir., M.Eng.Sc. lahir di Cirebon; sejak 1981 bekerja di Balai Besar Teknologi Tepat Guna, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (B2P-TTG LIPI) Subang, sebagai peneliti bidang teknologi pasca panen. Pada tahun 1996 hingga kini dipercayai untuk menjabat sebagai Kepala UPT Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna LIPI (UPT BPTTG) yang pada awal tahun 2005 berubah nama menjadi B2P-TTG LIPI. Menyelesaikan pendidikan S1 di bidang mekanisasi pertanian pada Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1981. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di bidang mechanical engineering di New South Wales University, Sydney-Australia yang diselesaikan pada tahun 1989. Berbagai pelatihan yang pernah diikuti antara lain di bidang agricultural engineering di Asian Institute of Technology (AIT) Bangkok dan IRRI Filipina pada tahun 1982 dan program in computer application development (CAD-CAM) di regional computer center AIT Bangkok pada tahun 1990. Kegiatan penelitian yang pernah dilakukan antara lain mengenai alat mesin pertanian dan teknologi pasca panen dan survai perencanaan pengembangan irigasi di Indonesia. Juga terlibat pada kegiatan action research yaitu pengembangan masyarakat di Wamena tahun 1993/1994-1994/1995 (Papua) dan Sumbawa 1996/1997-1997/1998 (NTB). Turut berpartisipasi pada berbagai seminar nasional, regional dan internasional di bidang teknologi pertanian dan pasca panen. Berbagai publikasi juga telah diterbitkan dalam prosiding, majalah, koran dan buku.

Budiawati S. Iskandar, Dra., M.A. seorang dosen pada jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung. Menyelesaikan sarjana muda pada jurusan Antropologi, Fakultas Sastra UNPAD Bandung pada tahun 1981 kemudian S1 pada jurusan Antropologi, Fakultas Sastra Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1984. Melanjutkan pendidikan S2 pada Department of Social Anthropology, University of Kent at Canterbury, The United Kingdom, pada tahun 1998. Bergabung dengan Jurusan Antropologi, FISIP UNPAD Bandung sebagai staf pengajar sejak tahun 1988 hingga sekarang. Berbagai kegiatan penelitian yang pernah dilakukan antara lain: penelitian tentang pengrajin peci di Jakarta tahun 1984; mutual help in farmer society di Drente, Netherland; women and traditional market in Ujung Berung, Bandung, untuk thesis S2; floating net economy in Saguling Dam, kerjasama Lembaga Ekologi dan University of Tokyo Jepang.

Tb. Zulrizka Iskandar, Prof. Dr., Drs., M.Sc. pengajar pada Fakultas Psikologi UNPAD Bandung. Saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Psikologi UNPAD Bandung.

Syahyuti, Ir., M.Si. lahir di Padang Pariaman; sejak tahun 1992 bekerja di Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, yaitu pada kelompok peneliti Kelembagaan dan Organisasi Pertanian. Menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian di Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 1991, dan master di bidang Sosiologi Pedesaan di IPB Bogor juga tahun 2002. Aktif dalam berbagai penelitian terutama untuk topik-topik sosiologi pertanian dan pedesaan, khususnya masalah agraria, kemiskinan, kelembagaan, perdagangan hasil-hasil pertanian, dan

lain-lain. Selain menulis di beberapa jurnal ilmiah, juga menulis buku "Bedah Konsep Kelembagaan: Strategi Pengembangan dan Penerapannya dalam Penelitian Pertanian".

Savitri Dyah W.I.K.R., Dr., M.Sc. lahir di Malang Jawa Timur; sejak tahun 1985 bekerja di Balai Besar Teknologi Tepat Guna, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (B2P-TTG LIPI) Subang, sebagai peneliti bidang pengembangan masyarakat dan sejak tahun 1996 dipercayai sebagai ketua kelompok peneliti pengembangan masyarakat. Menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Antropologi, Fakultas Sastra UNPAD Bandung tahun 1984, dan master di bidang Rural Development Planning pada Human Settlements Development Division di Asian Institute of Technology (AIT) Bangkok pada tahun 1988; dan menyelesaikan program doktor pada jurusan Sosiologi Pedesaan di IPB Bogor pada tahun 1997. Aktif dalam berbagai penelitian, terutama *action research* di bidang pengembangan masyarakat dengan wilayah-wilayah garapan: Papua (Wamena dan Makki di Kabupaten Jayawijaya, Ilaga di Kabupaten Puncak Jaya, Timika); NTB (Lombok Tengah dan Sumbawa), NTT (Kupang, Belu dan pulau Sumba); Sulawesi (Ujung Pandang di Sulawesi Selatan dan Poso di Sulawesi Tengah). Selain itu juga aktif mengikuti berbagai seminar nasional dan internasional di bidang community development. Beberapa tulisan dipublikasi dalam prosiding dan buku.

Lidya Ariesusanty, S.Si. lahir di Bandung, Jawa Barat. Menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Biologi UNPAD Bandung pada tahun 2003. Aktif dalam kegiatan sosial di Bird Conservation Society (BICONS), Yayasan Pribumi Alam Lestari (YPAL); relawan (sebagai koordinator)

1001 buku Bandung; relawan Wyata Guna (asrama tuna netra). Berpartisipasi di beberapa kegiatan penelitian antara lain: perubahan komunitas burung di kota Bandung antara 1984-2002; pemanfaatan teknologi tepat guna di wilayah DKI Jakarta; pembuatan pakan ikan; Java Hawk Eagle conservation project. Tulisan yang telah di publikasi yaitu Modul Pendidikan Lingkungan tahun 2003.